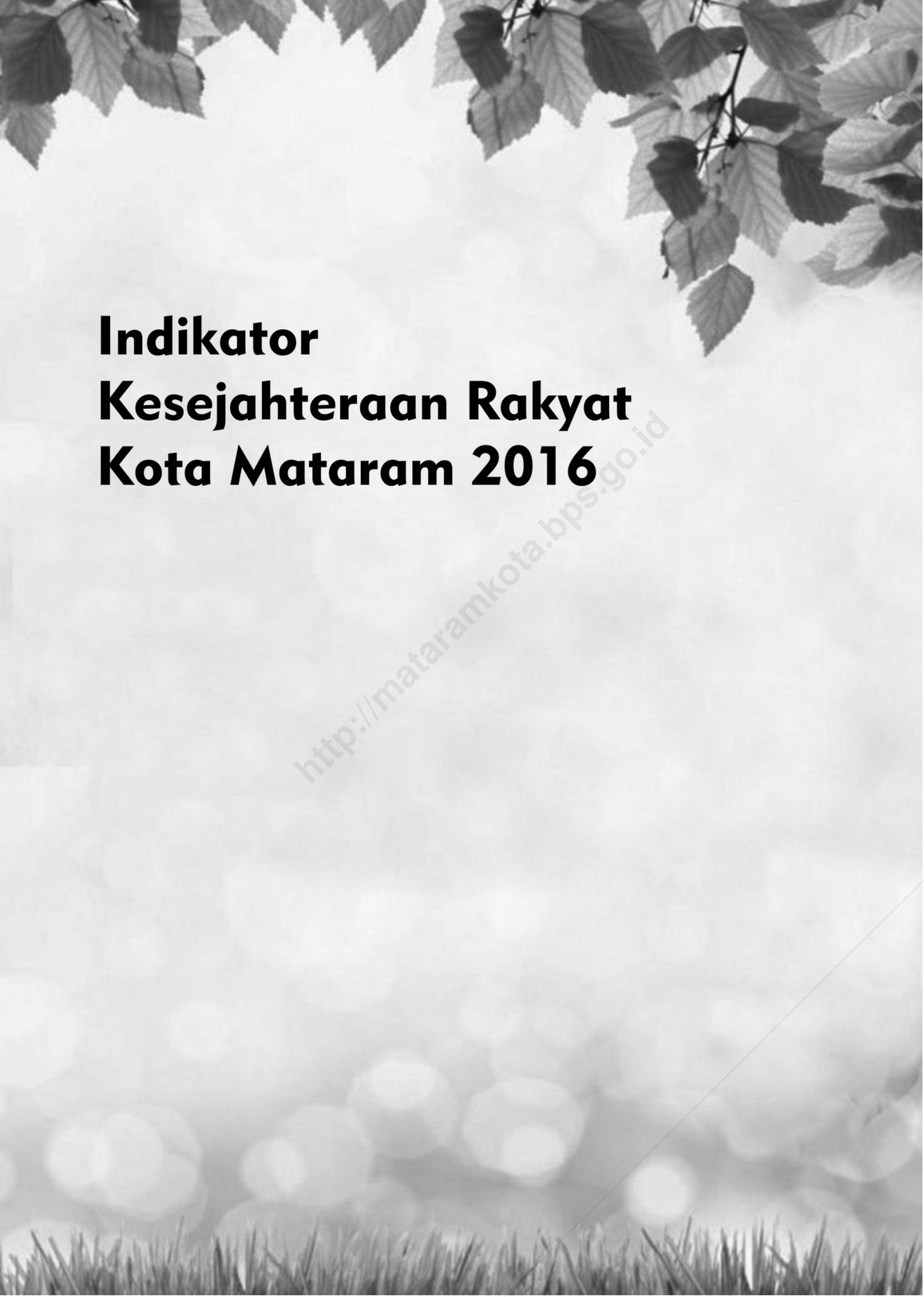


Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Mataram 2016

<http://mataramkota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MATARAM**



Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Mataram 2016

<http://mataramkota.bps.go.id>

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Mataram 2016

ISBN: 978-602-707-89-1-8

No. Publikasi: 52710.1711

Katalog: 4102004.5271

Ukuran Buku:

Jumlah Halaman: x + 73 halaman

Naskah:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kota Mataram

Gambar Kover oleh:

Seksi IPDS BPS Kota Mataram

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Kota Mataram

Dicetak oleh:

CV Maharani

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kota Mataram

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya publikasi “Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Mataram 2016” telah berhasil diterbitkan. Publikasi ini menggambarkan kesejahteraan rakyat melalui beberapa indikator pada masing-masing bidang pembangunan. Bidang pembangunan yang dimaksud disini adalah kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kemiskinan dan perumahan.

Sumber data yang dipergunakan dalam publikasi ini sebagian besar berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan ditambahkan beberapa data tambahan dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan data sekunder yang berasal dari beberapa SKPD terkait.

Penghargaan yang sebesar-besarnya kami berikan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya publikasi ini. Karena publikasi ini merupakan publikasi perdana maka kami menyadari sepenuhnya bahwa kekurangan masih banyak ditemukan. Untuk itu saran serta kritik membangun kami harapkan agar dimasa mendatang publikasi ini menjadi lebih baik.

Mataram, September 2017

BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MATARAM
Kepala,

Ir. LALU PUTRADI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Ruang Lingkup	3
1.3. Sumber Data.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
KONSEP DAN DEFINISI.....	7
KEPENDUDUKAN	7
KESEHATAN	10
PENDIDIKAN	11
KETENAGAKERJAAN.....	12
PERUMAHAN.....	13
KEPENDUDUKAN	15
3.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin	16
3.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk.....	17
3.3. Struktur Umur	19
3.4. Rasio Beban Tanggungan.....	22
3.5. Rata-rata Usia Perkawinan Pertama.....	24
4.1. Ketersediaan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan.....	28
4.2. Derajat dan Status Kesehatan Penduduk.....	30
4.3. Penolong Kelahiran.....	32
4.4. Angka Harapan Hidup (AHH).....	33
PENDIDIKAN.....	35
5.1. Fasilitas Pendidikan.....	36
5.2. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	36
5.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)	38
5.4. Angka Partisipasi Murni.....	40
5.5. Melek Huruf.....	41

5.6. Rata-rata Lama Sekolah (MYS/RLS)	42
6.1. Angkatan Kerja	46
6.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Kesempatan Kerja	47
6.3. Tingkat Pengangguran	48
6.4. Lapangan Pekerjaan	50
KEMISKINAN dan POLA KONSUMSI	51
7.1. Perkembangan Penduduk Miskin.....	52
7.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan	54
7.3. Indeks Keparahan Kemiskinan	55
7.4. Garis Kemiskinan.....	56
7.5. Pola Konsumsi	57
PERUMAHAN	61
8.1. Status Penguasaan Tempat Tinggal	62
8.2. Kualitas Tempat Tinggal.....	63
8.3. Fasilitas Air Minum.....	67
8.4. Fasilitas Buang Air Besar.....	68
8.5. Sumber Penerangan	70
DAFTAR PUSTAKA.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Mataram, 2012-2016	16
Tabel 3.2	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Mataram, 2016	19
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Kota Mataram Menurut Kelompok Umur, 2014-2016.....	20
Tabel 3.4	Rasio Beban Tanggungan, 2014-2016.....	23
Tabel 4.1	Jumlah Fasilitas Kesehatan Di Kota Mataram, 2016.....	29
Tabel 4.2	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kota Mataram, 2016	30
Tabel 4.3	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin, 2016	31
Tabel 4.4	Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir Menurut Jumlah Hari Sakit, Rata-rata Lama Sakit (Hari) dan Jenis Kelamin, 2016	32
Tabel 4.5	Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir, 2016	33
Tabel 5.1	Fasilitas Sekolah di Kota Mataram, 2016.....	36
Tabel 5.2	Angka Partisipasi Murni Kota Mataram, 2015-2016.....	40
Tabel 6.1	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Kota Mataram Tahun 2010-2015 (Jiwa)	46
Tabel 7.1	Garis Kemiskinan, Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Mataram, 2013-2016.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Mataram Menurut Kecamatan, 2016	17
Gambar 3.2	Persebaran Penduduk di Kota Mataram Menurut Kecamatan, 2016	18
Gambar 3.3	Kepadatan Penduduk di Kota Mataram, 2011- 2016 (Jiwa/km ²)	18
Gambar 3.4	Piramida Penduduk Kota Mataram, 2016	21
Gambar 3.5	Usia Perkawinan Pertama Penduduk Perempuan Kota Mataram, 2011-2016	25
Gambar 4.1	Angka Harapan Hidup Kota Mataram 2010-2016 (Tahun)	34
Gambar 5.1	Persentase Penduduk Usia 15+ Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2015-2016	37
Gambar 5.2	Angka Partisipasi Sekolah di Kota Mataram, 2014-2016	39
Gambar 5.3	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kota Mataram, 2016	39
Gambar 5.4	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Baca Tulis di Kota Mataram, 2015-2016	42
Gambar 5.5	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Baca Tulis di Kota Mataram, 2015-2016	43
Gambar 6.1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Mataram Tahun 2010-2015 (Persen)	49
Gambar 6.2	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kota Mataram, 2015	50
Gambar 7.1	Persentase Penduduk Miskin di Kota Mataram Tahun 2008-2016	53
Gambar 7.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Mataram, 2010-2016	54
Gambar 7.3	Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Mataram, 2010-2016	56
Gambar 7.4	Garis Kemiskinan di Kota Mataram, 2013-2016	57
Gambar 7.5	Persentase Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan di Kota Mataram, 2010-2016	58
Gambar 8.1	Persentase Rumah Tangga menurut Status Penguasaan Rumah di Kota Mataram, 2016	63
Gambar 8.2	Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Hunian Per Kapita di Kota Mataram, 2015-2016	64
Gambar 8.3	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas di Kota Mataram, 2015-2016	65

Gambar 8.4	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas di Kota Mataram, 2016	66
Gambar 8.5	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Terluas di Kota Mataram, 2016	67
Gambar 8.6	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Utama di Kota Mataram, 2016	68
Gambar 8.7	Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kota Mataram, 2015-2016	69
Gambar 8.8	Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kota Mataram, 2015-2016.....	70
Gambar 8.8	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Utama di Kota Mataram, 2016	71

<http://mataramkota.bps.go.id>



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Banyak faktor mempengaruhi terwujudnya kesejahteraan, baik sosial, ekonomi, potensi wilayah maupun budaya dan karenanya pembangunan harus dapat meliputi semua aspek tersebut. Secara nasional strategi pembangunan ditekankan pada perbaikan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan sekaligus ditujukan pula untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. Kendatipun demikian pada pelaksanaannya, aspek ekonomi cenderung mendapatkan prioritas yang lebih besar dibandingkan aspek pembangunan manusia.

Termasuk dalam proses pembangunan adalah usaha masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, tidak saja berupa kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian dan perumahan, tetapi juga kebutuhan non fisik, seperti pendidikan, keamanan, hiburan, status sosial, dan kesempatan kerja. Dalam usaha mempercepat terpenuhinya kebutuhan tersebut, Pemerintah Kota Mataram telah melaksanakan berbagai program di bidang-bidang yang strategis, seperti kesehatan, pendidikan dan perumahan. Kesemuanya itu memerlukan perencanaan sekaligus monitoring dan evaluasi yang cermat dan terarah. Hal ini penting agar dapat terlihat sejauh mana pembangunan telah berdampak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga dalam perogram pembangunan berikutnya dapat dilakukan perbaikan sekaligus penyempurnaan sehingga dapat lebih optimal.

Data akan indikator yang mencerminkan kesejahteraan rakyat menjadi suatu alat ukur yang jelas dibutuhkan. Dengan demikian selain penyediaan barang dan jasa yang dapat meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat, penyediaan data yang lengkap, cermat, tepat waktu dan berkesinambungan juga merupakan faktor penunjang proses pembangunan yang sangat menentukan kemajuan selanjutnya. Salah satu indikator dibidang sosial yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah Indikator Kesejahteraan Rakyat .

Indikator Kesejahteraan Rakyat ini merupakan resorsis atau dampak dalam arti indikator tersebut mengilustrasikan pengaruh atau dampak langsung dari pembangunan. Dari Indikator Kesejahteraan Rakyat ini dapat diperoleh gambaran mengenai tingkat kesejahteraan rakyat seperti derajat kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan, penduduk miskin, pola konsumsi dan lain-lain. Data statistik yang digunakan dalam penyusunan indikator ini dipilih sedemikian rupa sehingga secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan gambaran mengenai keadaan, proses serta perkembangan kesejahteraan rakyat.

Untuk menyajikan data statistik yang mampu mencakup semua segi kesejahteraan rakyat, merupakan hal yang tidak mungkin, karena tidak semua aspek kesejahteraan dalam pengertian luas seperti disebutkan di atas, dapat diukur secara statistik. Indikator yang disajikan dalam publikasi ini hanya menyangkut segi-segi kesejahteraan yang dapat diukur. Berbeda halnya dengan statistik ekonomi yang pengumpulan datanya relatif lebih mudah, lebih sering dan lebih teratur, statistik sosial yang merupakan komponen penyusunan Inkesra pengumpulan datanya relatif lebih sulit, lebih jarang dan kurang teratur pengumpulan datanya di lapangan.

Giatnya pembangunan yang sedang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Mataram belum dapat tergambar secara kualitatif tanpa dukungan data yang memadai dan terkini. Keterbandingan dengan daerah lain juga belum dapat diukur tanpa adanya data. Oleh sebab itu paparan data mengenai indikator kesejahteraan rakyat mutlak diperlukan. Informasi yang

dituangkan dalam bentuk tabel dan grafis dimaksudkan agar data dapat lebih mudah dipahami.

1.2. Ruang Lingkup

Publikasi ini berisi data dan ulasan singkat mengenai berbagai variabel yang berkaitan dengan kesejahteraan penduduk dan rumah tangga di Kota Mataram pada tahun 2016. Dimensi yang akan disajikan akan dipadukan dalam beberapa bab yang meliputi indikator kependudukan, kesehatan, pendidikan, angkatan kerja, fertilitas dan keluarga berencana, serta perumahan.

1.3. Sumber Data

Statistik dan indikator yang diperlukan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan haruslah berkala sehingga bersumber dari survei tahunan. Hal ini karena adanya suatu kebutuhan untuk mengetahui perubahan setiap tahun dari pelaksanaan program yang telah disusun, dan pengaruhnya pada keadaan sosial masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan salah satu survei yang diselenggarakan oleh BPS yang menyediakan data yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Dari survei-survei yang dilaksanakan BPS, Susenas merupakan survei yang mempunyai cakupan data sosial paling luas. Data yang dikumpulkan antara lain menyangkut bidang-bidang pendidikan, kesehatan/gizi, ketenagakerjaan, perumahan/lingkungan hidup, kriminalitas, sosial budaya, konsumsi dan pengeluaran rumah tangga, dan alat komunikasi.

Pada tahun 1992, tatkala pemerintah memerlukan informasi untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, sistem pengumpulan data Susenas diperbarui. Butir-butir data yang digunakan untuk menyusun indikator kesejahteraan rakyat dalam modul, yaitu kelompok keterangan yang dikumpulkan dalam tiga tahun sekali, ditarik ke dalam kor, yaitu kelompok keterangan yang dikumpulkan tiap tahun. Sejak itu, dalam Susenas tiap tahun tersedia perangkat data yang

dapat digunakan untuk memantau taraf kesejahteraan masyarakat, merumuskan program pemerintah yang khusus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sektor-sektor tertentu dalam masyarakat, dan menganalisis dampak berbagai program peningkatan kesejahteraan penduduk.

Dalam kor baru Susenas terdapat pertanyaan-pertanyaan tentang keadaan dan perilaku anggota masyarakat yang erat kaitannya dengan berbagai aspek kesejahteraan seperti apakah ia melakukan perjalanan, apakah masih sekolah, apakah mengalami gangguan kesehatan, apakah rawat jalan atau rawat inap dan lain-lain. Pertanyaan yang khusus menyangkut balita antara lain meliputi penolong kelahiran dan berapa lama disusui. Melalui kor juga dikumpulkan data tentang jenjang pendidikan, kegiatan ekonomi anggota rumah tangga, dan bagi wanita, tentang umur saat perkawinan pertama dan perilaku ber KB. Untuk keterangan rumah tangga dihimpun data mengenai keadaan dan fasilitas perumahan dan pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Pertanyaan-pertanyaan dalam Susenas kor dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memonitor hal-hal yang mungkin berubah tiap tahun, berguna untuk perencanaan jangka pendek, serta pertanyaan yang dapat dikaitkan dengan pertanyaan modul. Pertanyaan yang dimasukkan dalam modul diperlukan untuk menganalisis masalah yang tidak perlu dimonitor tiap tahun atau menganalisis fenomena yang ingin diintervensi pemerintah.

Data Susenas memiliki potensi yang sangat besar untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya untuk menggambarkan keadaan berbagai komponen kesejahteraan dapat disusun berbagai data agregat berupa indikator seperti tingkat partisipasi sekolah, persentase akseptor KB, rata-rata umur perkawinan pertama, rata-rata jumlah anak yang dilahirkan, persentase penduduk yang memanfaatkan fasilitas kesehatan, persentase balita yang diberi ASI, persentase rumah tangga yang memperoleh air bersih, atau mempunyai WC dengan tangki septik, dan rata-rata pengeluaran per kapita.

Survei ini juga menghimpun keterangan mengenai ketenagakerjaan, yang mencakup jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, struktur tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan, pengangguran, dan rata-rata jam kerja penduduk yang bekerja. Sebagai pelengkap indikator ketenagakerjaan, digunakan pula hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Sakernas ini juga merupakan survei rutin yang dilaksanakan setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai ketenagakerjaan. Sebagai bahan pelengkap, akan digunakan juga data sekunder yang berasal dari SKPD-SKPD terkait di lingkup pemerintahan Kota Mataram.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian pada publikasi ini pada intinya berupa tabel yang disertai ulasan singkat (analisa deskriptif) terhadap beberapa data dari masing-masing variabel yang ada dalam ruang lingkup penulisan.

Secara garis besar data/variabel kesejahteraan rakyat dalam publikasi ini dikelompokkan menjadi enam bagian. **Bagian pertama** merupakan data kependudukan, mencakup antara lain jumlah penduduk menurut jenis kelamin, umur, dan status perkawinan. **Bagian kedua**, menyajikan kondisi kesehatan penduduk yang menyangkut keluhan kesehatan, jumlah hari sakit, penolong kelahiran balita, kondisi balita dan pemanfaatan fasilitas kesehatan. Di **bagian ketiga** ditampilkan kondisi pendidikan penduduk yang mencakup partisipasi sekolah, status pendidikan, tingkat pendidikan, dan melek huruf. Data bidang ketenagakerjaan ditampilkan pada **bagian keempat** publikasi ini, yang mencakup kegiatan utama penduduk, jam kerja, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan. Gambaran mengenai fertilitas dan keluarga berencana disajikan pada bagian lima. Kemudian pada **bagian keenam** yang merupakan bagian akhir disajikan data perumahan.

<http://mataramkota.bps.go.id>



2

KONSEP DAN DEFINISI

KEPENDUDUKAN

- Penduduk** adalah setiap orang yang menetap di suatu wilayah selama enam bulan atau lebih dan atau yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap lebih dari enam bulan.
- Laju Pertumbuhan Penduduk** adalah persentase perubahan penduduk dalam periode tertentu (biasanya setahun). Rumus yang digunakan adalah:

$$P_t = P_0 (1 + r)^t$$

P_t adalah jumlah penduduk pada tahun t

P_0 adalah penduduk pada tahun 0

r adalah laju pertumbuhan penduduk

- Tingkat Kepadatan** adalah jumlah penduduk di suatu wilayah dibagi dengan luas wilayah yang bersangkutan. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Tingkat Kepadatan} \left(\frac{\text{jiwa}}{\text{km}^2} \right) = \frac{\text{Jumlah penduduk suatu wilayah (jiwa)}}{\text{Luas wilayah}}$$

- Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)** adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio jenis Kelamin} = \frac{\text{Jumlah Penduduk laki - laki}}{\text{jumlah penduduk perempuan}} \times 100$$

- e. **Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*)** adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang termasuk dalam usia tidak produktif (0-14 tahun) /penduduk usia muda dan 65 tahun ke atas/penduduk usia tua) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun). Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Angka Beban Tanggungan} = \frac{\text{penduduk usia } 0 - 14 \text{ dan } 65 +}{\text{penduduk usia } 15 - 64 \text{ tahun}} \times 100$$

Total Fertilty Rate (TFR) atau Angka Kelahiran Total adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sepanjang usia reproduksinya.

f. Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga

Rumah tangga dibedakan menjadi dua, yaitu rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus.

a. Rumah tangga biasa adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu. Ada beberapa macam bentuk rumah tangga biasa, diantaranya:

- 1) orang yang tinggal bersama isteri dan anaknya;
- 2) orang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus dan mengurus makannya sendiri;
- 3) keluarga yang terpisah di dua bangunan sensus, tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut masih dalam satu segmen.
- 4) rumah tangga yang menerima pondokan dengan makan (indekos) yang pemondok nya kurang dari 10 orang.
- 5) pengurus asrama, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, dan sejenisnya yang tinggal sendiri maupun bersama anak, isteri serta anggota rumah tangga lainnya, makan dari satu dapur yang terpisah dari lembaga yang diurusnya.
- 6) masing-masing orang yang bersama-sama menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi mengurus makannya sendiri-sendiri.

b. Rumah tangga khusus adalah

- (i) orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga dan,
- (ii) kelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah lebih dari 10 orang.

Rumah tangga khusus tidak dicakup dalam Susenas.

Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasa bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada saat pencacahan maupun sementara tidak ada. Anggota rumah tangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih, dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan pindah/akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih, tidak dianggap sebagai anggota rumah tangga.

Orang yang telah tinggal di suatu rumah tangga 6 bulan atau lebih atau yang telah tinggal di suatu rumah tangga kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap di rumah tangga tersebut dianggap sebagai anggota rumah tangga.

g. Status Perkawinan

Kawin adalah mempunyai isteri (bagi laki-laki) atau suami (bagi perempuan) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya) tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami isteri.

Cerai Hidup adalah berpisah sebagai suami/ isteri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/isteri ditinggalkan oleh isteri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap cerai hidup.

Cerai mati adalah ditinggal mati oleh suami (bagi perempuan) atau isterinya (bagi laki-laki) dan pada saat pencacahan belum kawin lagi.

KESEHATAN

- a. **Angka Harapan Hidup (AHH)** adalah perkiraan rata-rata lamanya hidup (dalam tahun) dari lahir yang dapat ditempuh oleh seseorang.
- b. **Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan** adalah rasio antara banyaknya penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dibagi dengan jumlah penduduk pada saat tertentu. Presentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan diantaranya panas, batuk, pilek, asma/sesak nafas, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi atau keluhan lainnya juga termasuk orang yang memiliki penyakit akut atau penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan).

Rumus penghitungan:

$$PKK = \frac{\text{Jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$$

PKK : Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan.

Angka Morbiditas (Angka Kesakitan) Merupakan presentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari (sakit).

Rumus penghitungan:

$$AM = \frac{\text{Jumlah penduduk sakit}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$$

AM: Angka morbiditas/kesakitan.

- c. **Rata-rata Lama Sakit adalah rata-rata lamanya terganggu kesehatan (dalam hari)** yaitu terganggunya kegiatan/aktivitas sehari-hari bagi seseorang yang mengalami keluhan kesehatan. Menunjukkan rata-rata lama hari sakit yang dialami penduduk. Rata-rata lama sakit dimaksud selama satu bulan terakhir (maksimal per individu 30 hari).

Rumus penghitungan:

$$\text{RRLS} = \frac{\text{Total hari lama sakit}}{\text{Jumlah penduduk yang sakit}}$$

RRLS : Rata-rata lama sakit.

- d. **Persentase Persalinan oleh Tenaga Medis** adalah rasio banyaknya proses persalinan yang ditolong oleh tenaga medis (dokter, paramedis, bidan, dan perawat) terhadap seluruh persalinan yang terjadi pada saat tertentu.
- e. **Keluhan Kesehatan** adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan, atau hal lain. Seseorang yang menderita penyakit *kronis* dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

PENDIDIKAN

- a. **Sekolah** adalah kegiatan bersekolah di sekolah formal mulai dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi, termasuk pendidikan yang disetarakan.
- b. **Tidak/belum pernah sekolah** adalah tidak atau belum pernah sekolah di sekolah formal, misalnya tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke SD.
- c. **Masih bersekolah** adalah sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.
- d. **Tidak bersekolah lagi** adalah pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah atau tinggi, tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.
- e. **Tamat sekolah** adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Orang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian dan lulus dianggap tamat sekolah.
- f. **Angka Melek Huruf (AMH)** adalah perbandingan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya dengan jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas.

$$AMH = \frac{\text{Penduduk 15 tahun keatas yang melek huruf}}{\text{jumlah penduduk 15 tahun keatas}} \times 100$$

- g. **Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling/MYS*)** adalah rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk dewasa (15tahun ke atas) di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalaninya. *MYS* dihitung dengan menggunakan tiga variabel secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan.
- h. **Angka Partisipasi Sekolah (*APS*)** adalah perbandingan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu yang masih sekolah dengan jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia yang bersesuaian.

Rumus yang digunakan adalah:

$$APS_i = \frac{\text{Jumlah penduduk yang bersekolah kelompok umur } i}{\text{Jumlah penduduk kelompok umur } i}$$

***i* = kelompok usia = 7 – 12, 13 – 15, 16 – 18**

- i. **Angka Partisipasi Murni (*APM*)** adalah perbandingan jumlah penduduk yang masih sekolah pada jenjang tertentu (*SD, SLTP* atau *SLTA*) pada kelompok usia yang sesuai dengan jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia yang bersesuaian.

Rumus yang digunakan adalah:

$$APM_i = \frac{\text{Jumlah penduduk yang bersekolah usia bersesuaian}_i}{\text{Jumlah penduduk usia bersesuaian}}$$

***i* = Jenjang = *SD* (7 – 12), *SMP* (13 – 15), *SMA* (16 – 18)**

KETENAGAKERJAAN

- a. **Angkatan Kerja** adalah mereka yang ber-umur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu sebelum survei mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen, sedang cuti dan menunggu pekerjaan berikutnya (pekerja bebas profesional seperti dukun dan dalang). Disamping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan atau mengharapkan dapat pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja.

-
- b. **Bukan angkatan kerja** adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya, serta tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja atau mencari pekerjaan.
 - c. **Kegiatan yang terbanyak dilakukan** adalah kegiatan yang menggunakan waktu terbanyak dibandingkan dengan kegiatan lain-nya.
 - d. **Bekerja** adalah kegiatan melakukan pekerja-an dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu terus menerus dan tidak terputus (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam usaha/kegiatan ekonomi).
 - e. **Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja** adalah mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena suatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen dan mogok.

PERUMAHAN

- a. **Luas lantai** adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (lamporan semen), dan ruang khusus untuk usaha (misalnya warung).
- b. **Dinding** adalah sisi luas/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumah tangga atau bangunan lain.
- c. **Atap** adalah penutup bagian atas bangunan yang melindungi orang yang mendiami dari teriknya matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.
- d. **Air Leding** adalah sumber air yang berasal dari air yang telah diproses menjadi jernih sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM/PDAM/BPAM (Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum/Badan Pengelola Air Minum).

-
- e. **Air Sumur/perigi terlindung** bila lingkaran mulut sumur/perigi tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit setinggi 0,8 meter di atas tanah dan sedalam 3 meter di bawah tanah dan di sekitar mulut ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran mulut sumur atau perigi.
 - f. **Kloset/dudukan leher angsa** adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf "U" (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar.
 - g. **Plengsengan** adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya terdapat saluran rata yang dimiringkan ke pembuangan kotoran.
 - h. **Cemplung/cubluk** adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya tidak ada saluran langsung ke tempat pembuangan penampungan akhir.
 - i. **Lainnya** adalah tidak mempunyai tempat untuk duduk/jongkok termasuk yang tidak mempunyai jamban/kakus.



KEPENDUDUKAN

Penduduk dapat menjadi nilai tambah sekaligus beban bagi pemerintah apabila tidak dapat ditangani dengan baik. Banyaknya jumlah penduduk bisa memperkuat faktor produksi dan menjadi potensi ekonomi apabila memang penduduknya berkualitas. Di sisi lain penambahan penduduk yang tidak dapat dikendalikan akan menjadi bom waktu yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan hingga bermuara pada terhambatnya pembangunan. Masalah kesenjangan sosial, penyediaan kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, ketersediaan lapangan pekerjaan bahkan hingga ke perumahan akan menjadi beberapa permasalahan yang ditimbulkan akibat penduduk.

Di dalam suatu negara penduduk dapat dipandang sebagai obyek pembangunan dan sekaligus sebagai subyek pembangunan. Sebagai obyek pembangunan penduduk merupakan sasaran pembangunan untuk diupayakan peningkatan SDM dan kesejahteraan hidupnya. Sedangkan penduduk selaku subyek pembangunan berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring (kontrol), dan evaluasi hasil-hasil pembangunan. Pembangunan yang tidak didukung oleh peningkatan kualitas penduduk yang memadai dapat berakibat tidak tercapainya tujuan akhir dari pembangunan.

Salah satu masalah yang sangat perlu diperhatikan dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan antara lain meliputi jumlah

penduduk, pertumbuhan penduduk, komposisi dan persebaran/distribusinya. Sebagai contoh misalnya jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal dasar pembangunan bila kualitas sumber daya manusianya tinggi, namun sebaliknya bila kualitas sumber daya manusianya rendah maka akan menjadi beban pembangunan yang cukup berat.

3.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Jumlah penduduk memang selalu meningkat setiap tahunnya, namun peningkatan yang terkendali dan terencana akan mampu mengarahkan pembangunan menjadi lebih baik. Jika pada Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk Kota Mataram masih berjumlah 402.843, maka pada tahun 2016 penduduk Kota Mataram melesat naik menjadi 459.314 jiwa. Dengan kata lain dalam tujuh tahun terakhir rata-rata setiap tahunnya penduduk Kota Mataram meningkat sebanyak 9.412 jiwa atau sebesar 2,34 persen per tahun.

Tabel 3.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Mataram, 2012-2016

Keterangan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Penduduk (Jiwa)	422.673	431.876	441.064	450.226	459.314
Pertumbuhan Penduduk (%)	2,19	2,18	2,13	2,08	2,02
Rasio Jenis Kelamin (%)	98	98	98	98	98

Sumber: BPS Kota Mataram

Rasio jenis kelamin Kota Mataram dalam lima terakhir juga selalu berada di bawah 100 yang artinya jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit daripada jumlah penduduk perempuan. Pengarusutamaan gender memang digadag-gadag oleh pemerintah untuk menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan maupun penganggaran. Kondisi bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki di Kota Mataram seharusnya dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menyelenggarakan program berbasis gender. Kondisi kependudukan yang terjadi telah membuat kebijakan berbasis gender menjadi suatu keharusan.

Pertumbuhan penduduk menurut kecamatan tahun 2016 berkisar antara 0,31 persen (Selaparang) sampai dengan 3,83 persen (Sekarbela). Ada dua kecamatan yang memiliki pertumbuhan penduduk lebih dari 3 persen yaitu Sekarbela dan Sandubaya. Kedua kecamatan tersebut merupakan wilayah pengembangan pemukiman penduduk yang terlihat dari semakin banyaknya pembangunan kompleks perumahan.

Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Mataram Menurut Kecamatan, 2016



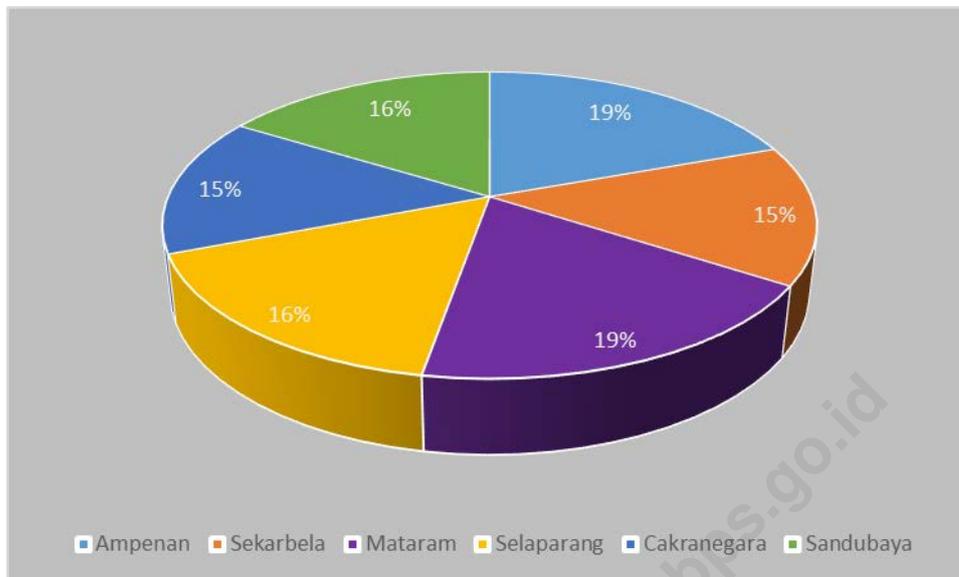
Sumber: BPS Kota Mataram

3.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Persebaran penduduk dapat dibagi 2: 1) Persebaran penduduk berdasarkan geografis yaitu karakteristik penduduk menurut batas-batas alam seperti pantai, danau dan sebagainya; 2) Persebaran penduduk berdasarkan administrasi pemerintahan, yaitu karakteristik penduduk menurut batas-batas wilayah administrasi yang ditetapkan oleh suatu negara seperti jumlah penduduk di Kecamatan A, Kelurahan B.

Persebaran penduduk yang tidak merata merupakan masalah kependudukan yang senantiasa perlu mendapat perhatian. Ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya tampung sumber daya alam dan pranata sosial ekonomi dapat mengakibatkan rendahnya tingkat kesejahteraan.

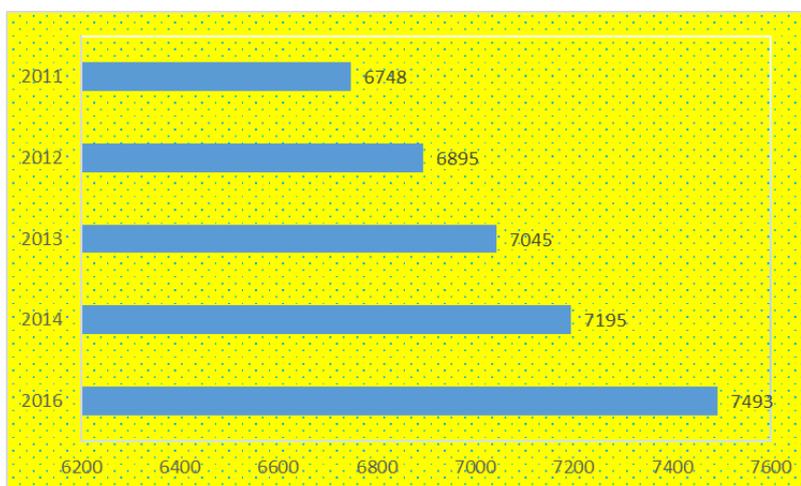
Gambar 3.2 Persebaran Penduduk di Kota Mataram Menurut Kecamatan, 2016



Sumber: BPS Kota Mataram

Kota Mataram terdiri dari Enam Kecamatan, yaitu Ampenan, Sekarbela, Mataram, Selaparang, Cakranegara dan Sandubaya. Persebaran penduduk di enam kecamatan relatif merata yaitu berkisar antara 15-19 persen. Kecamatan Ampenan merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar yaitu mencapai 89.421 jiwa pada tahun 2016 atau sekitar 19,47 persen dan Kecamatan Cakranegara memiliki jumlah penduduk terkecil sebesar 67.431 jiwa atau sekitar 14,67 persen.

Gambar 3.3 Kepadatan Penduduk di Kota Mataram, 2011- 2016 (Jiwa/km²)



Sumber: BPS Kota Mataram

Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayahnya atau dengan kata lain merupakan angka yang menunjukkan jumlah rata-rata penduduk per km² pada suatu wilayah. Penduduk Kota Mataram setiap tahun mengalami peningkatan dengan luas wilayah yang relatif tidak berubah, sehingga setiap tahun kepadatan penduduk per km² juga meningkat. Kepadatan penduduk Kota Mataram tahun 2011 mencapai 6.748 jiwa per km² meningkat menjadi 7.493 jiwa per km² pada tahun 2016.

Kecamatan Ampenan dengan luas wilayah terkecil, yaitu hanya 15,43 persen dari wilayah Kota Mataram dengan jumlah penduduk tertinggi menjadikan Ampenan sebagai kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2016 yakni mencapai 9.453 jiwa per km². Sedangkan Kecamatan Sekarbela memiliki kepadatan penduduk terkecil yaitu 6.534 jiwa per km².

Tabel 3.2 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Mataram, 2016

Kecamatan	Luas Daerah (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan per km ²
Ampenan	9,46	89.421	9.453
Sekarbela	10,32	67.431	6.534
Mataram	10,76	85.491	7.945
Selaparang	10,77	75.027	6.966
Cakranegara	9,67	67.395	6.969
Sandubaya	10,32	74.549	7.224
Kota Mataram	61,30	459.314	7.493

Sumber: BPS Kota Mataram

3.3. Struktur Umur

Data kelompok umur penduduk sangat berguna untuk menganalisis demografi, sosial serta perencanaan ekonomi suatu daerah/negara. Pada umumnya penduduk suatu daerah/negara maju tergolong penduduk tua (*old population*) dan penduduk daerah/negara berkembang tergolong penduduk muda (*young population*).

Untuk menentukan kondisi struktur umur penduduk, apakah tergolong penduduk tua atau muda dapat dilakukan dengan melihat umur median penduduk dengan cara antara lain yaitu:

- Tergolong penduduk muda (*young popilation*), jika umur median lebih kecil dari 20 tahun.
- Tergolong penduduk intermediate (transisi), jika umur median antara 20–30 tahun.
- Tergolong penduduk tua (*old population*), jika umur median lebih besar dari 30 tahun.

Pengelompokan umur digunakan juga sebagai dasar untuk melakukan kebijaksanaan / keputusan yang berkaitan dengan kelompok-kelompok umur, misalnya balita (0 – 4 tahun), angkatan kerja, penduduk usia sekolah, penduduk usia subur dan lain sebagainya.

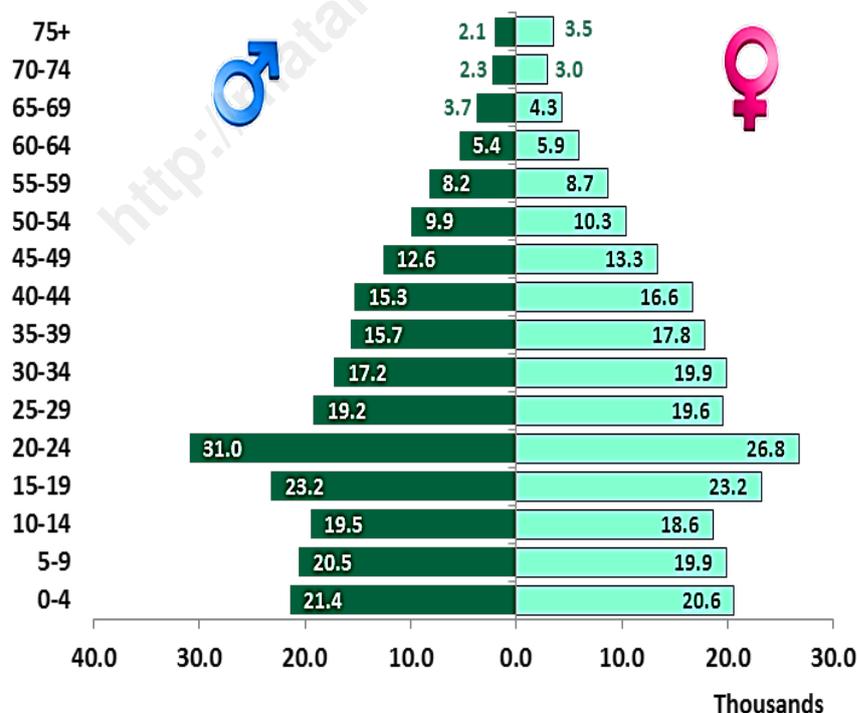
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Kota Mataram Menurut Kelompok Umur, 2014-2016

KELOMPOK UMUR	2014		2015		2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-4	41.775	9,47	41.947	9,32	42.073	9,16
5-9	38.748	8,79	39.663	8,81	40.421	8,80
10-14	36.851	8,36	37.430	8,31	38.097	8,29
15-19	45.254	10,26	45.849	10,18	46.397	10,10
20-24	56.105	12,72	56.886	12,63	57.740	12,57
25-29	37.746	8,56	38.241	8,49	38.772	8,44
30-34	36.236	8,22	36.654	8,14	37.100	8,08
35-39	32.237	7,31	32.961	7,32	33.512	7,30
40-44	30.119	6,83	31.023	6,89	31.922	6,95
45-49	24.068	5,46	24.988	5,55	25.955	5,65
50-54	18.787	4,26	19.525	4,34	20.238	4,41
55-59	15.468	3,51	16.191	3,60	16.943	3,69
60-64	10.181	2,31	10.726	2,38	11.313	2,46
65-69	7.393	1,68	7.747	1,72	8.047	1,75
70-74	4.896	1,11	5.035	1,12	5.234	1,14
75+	5.200	1,18	5.360	1,19	5.550	1,21
Jumlah	441.064	100,00	450.226	100,00	459.314	100,00

Sumber: BPS Kota Mataram (Proyeksi Penduduk)

Komposisi penduduk Kota Mataram didominasi oleh kelompok usia muda dan usia produktif. Jika pada tahun 2014 jumlah balita Kota Mataram mencapai 41.775 jiwa, maka pada tahun 2016 meningkat menjadi 42.073 jiwa. Banyaknya jumlah balita setiap tahun dalam tiga tahun terakhir mengindikasikan beberapa hal diantaranya banyak kelahiran baru yang artinya program Keluarga Berencana (KB) belum berjalan secara efektif. Fenomena ini bisa juga mengindikasikan meningkatnya derajat kesehatan balita dan menurunnya angka kematian bayi di Kota Mataram. Tentu saja untuk membuktikan indikasi tersebut diperlukan penelitian lebih lanjut, namun signal yang nampak menjadi indikasi positif akan pembangunan kesehatan masyarakat Kota Mataram sekaligus signal negatif bagi pelaksanaan program KB. Piramida penduduk akan memberikan gambaran lebih jelas mengenai komposisi penduduk Kota Mataram.

Gambar 3.4 Piramida Penduduk Kota Mataram, 2016



Sumber: BPS Kota Mataram

Sebagaimana tampak pada piramida penduduk, kelompok umur 20-24 tahun merupakan yang terbesar di Kota Mataram. Untuk menjadikan penduduk usia produktif ini sebagai potensi wilayah, harus dapat dijamin kualitas penduduk tersebut. Apabila penduduk ini berkualitas maka daya saingnya akan tinggi sehingga secara langsung akan berdampak pada kualitas kesejahteraan penduduk Kota Mataram.

Implikasi lain yang dapat muncul dari besarnya penduduk usia sekolah dan produktif adalah lapangan pekerjaan, ketersediaannya harus dapat dijaga oleh pemerintah untuk dapat menampung penduduk usia produktif ini karena jika tidak tentu saja akan berdampak pada banyaknya pengangguran. Mengingat penduduk usia sekolah juga cukup banyak, maka kebijakan di bidang pendidikan juga perlu dicermati agar dapat meningkatkan kualitas intelektual masyarakat Kota Mataram.

3.4. Rasio Beban Tanggungan

Angka beban tanggungan penduduk dinyatakan dengan rasio perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (0 – 14 tahun) dan usia (65 tahun keatas), dengan penduduk produktif (15 – 64 tahun), yang diasumsikan produktif secara ekonomis. Angka beban tanggungan ini disebut juga dengan istilah Dependency Ratio untuk anak-anak dan Dependency Ratio untuk lansia. Semakin tinggi beban angka tanggungan ini, maka semakin banyak beban penduduk yang produktif untuk menanggung penduduk yang tidak produktif.

Angka beban tanggungan penduduk disebut juga dengan Angka Ketergantungan penduduk. Angka ketergantungan penduduk yang baik adalah angka ketergantungan yang semakin lama semakin kecil, artinya jumlah anak-anak dan lansia yang harus ditanggung oleh penduduk produktif itu semakin kecil atau semakin sedikit untuk setiap 100 penduduk produktif.

Tabel 3.4 Rasio Beban Tanggungan, 2014-2016

Rasio Ketergantungan	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk Usia Muda	38,33	38,02	37,70
Penduduk Usia Tua	5,71	5,80	5,85
Ketergantungan Total	44,04	43,82	43,58

Sumber: BPS Kota Mataram

Rasio beban tanggungan ekonomi penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tua maupun muda di Kota Mataram sejak tahun 2014 hingga 2016 menunjukkan kecenderungan menurun. Tahun 2014 Rasio Ketergantungan menunjukkan angka 44,04 dan pada tahun 2016 turun menjadi 43,58, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 43 penduduk usia non produktif.

Dipilah menurut usia muda dan tua, rasio beban tanggungan usia muda lebih besar dari usia tua sehingga penduduk usia produktif lebih banyak menanggung penduduk usia muda dari pada tua. *Dependency ratio* usia muda yang bernilai 37,70 diartikan bahwa dari 100 penduduk usia produktif harus menanggung 37 penduduk usia muda, sedangkan rasio ketergantungan penduduk usia tua sebesar 5,85, artinya 100 penduduk usia produktif harus menanggung 5 penduduk usia tua.

Fenomena ini kembali menekankan betapa perlunya menggalakkan program Keluarga Berencana (KB) karena dapat dilihat bahwa penduduk usia muda ini memang membuat beban tanggungan ekonomi penduduk produktif menjadi besar. Paradigma bahwa KB adalah untuk menghentikan kelahiran harus diubah dan diganti menjadi merencanakan kehamilan. Dengan merencanakan kehamilan, keluarga dapat berupaya untuk menjarangkan kehamilan agar setiap anak yang dilahirkan menjadi lebih berkualitas dan orang tua dapat lebih focus dalam menuangkan kasih sayang dan mendidik anak-anaknya.

3.5. Rata-rata Usia Perkawinan Pertama

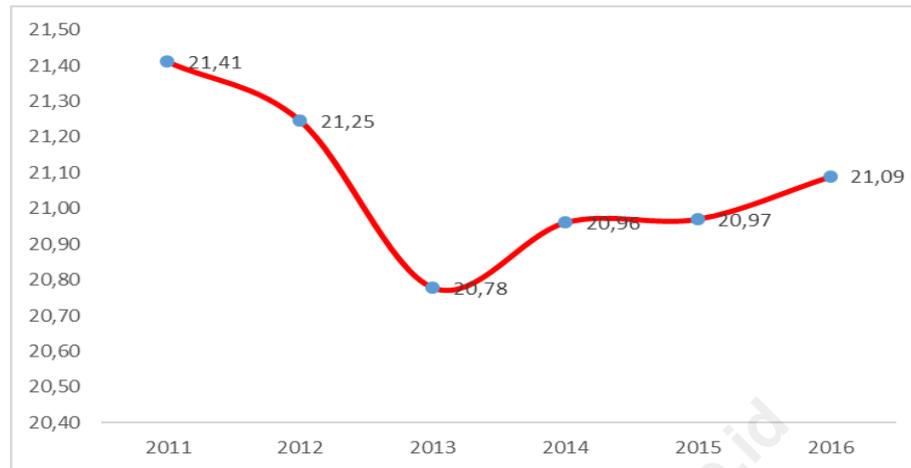
Perkawinan adalah suatu hal yang secara naluri akan dituju oleh setiap manusia. Pada saat seseorang telah matang secara emosi, fisik dan seharusnya ditunjang oleh materi, setiap orang pasti berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan. Tidak hanya sebagai sarana untuk meneruskan keturunan, pernikahan juga menjadi sarana ibadah dan bukti ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pernikahan usia muda secara agama memang tidak dilarang, namun beberapa penelitian telah membuktikan bahwa akan lebih baik bagi perempuan untuk tidak menikah muda. Selain karena alasan emosi yang belum stabil, alasan kesehatan fisik juga mendasari hasil penelitian ini, dimana apabila wanita menikah muda akan lebih rentan terhadap penyakit reproduksi.

Dilihat dari usia perkawinan utama tampak bahwa penduduk perempuan cenderung menikah muda. Faktor budaya yang telah mengakar di Indonesia dan tidak terkecuali di Kota Mataram, bahwa kodrat perempuan adalah untuk menikah, memiliki keturunan dan mengurus rumah tangga menjadi salah satu penyebab utama fenomena ini. Selain itu secara fisik, perempuan memang cenderung lebih cepat dewasa dibanding laki-laki sehingga walaupun usianya masih muda selama ia sudah mengalami menstruasi, orang tuanya tidak akan menunda pernikahan mereka. Laki-laki disisi lain, dianggap sebagai penanggung jawab ekonomi keluarga dan pencari nafkah utama di rumah tangga, sehingga laki-laki cenderung akan menikah setelah memperoleh pekerjaan.

Rata-rata usia perkawinan pertama akan mengindikasikan fertilitas penduduk. Semakin muda seseorang melangsungkan perkawinan maka akan semakin panjang usia reproduksinya, dan dampaknya peluang mereka untuk terus melahirkan anak akan semakin besar.

Gambar 3.5 Usia Perkawinan Pertama Penduduk Perempuan Kota Mataram, 2011-2016



Rata-rata usia perkawinan pertama penduduk perempuan di Kota Mataram dalam enam tahun terakhir berkisar antara 20,78 tahun hingga 21,41 tahun. Undang-undang perkawinan di Indonesia memang mengatur usia minimal untuk menikah adalah 16 tahun, berarti usia perkawinan pertama penduduk perempuan di Kota Mataram sudah sesuai dengan Undang-Undang.

<http://mataramkota.bps.go.id>



KESEHATAN

Pembangunan kesehatan merupakan bagian terpadu dari pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan pembangunan, yaitu mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan batin. Salah satu ciri bangsa yang maju adalah bangsa yang mempunyai derajat kesehatan yang tinggi dengan mutu kehidupan yang tinggi pula. Maka pembangunan kesehatan selain diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat juga untuk meningkatkan mutu dan kemudahan pelayanan kesehatan yang semakin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dewasa ini pembangunan kesehatan semakin mendapat perhatian yang luas di seluruh dunia, di mana terjadi perubahan paradigma yang semula memandang kesehatan sebagai suatu komoditi yang konsumtif belaka, kini menjadi suatu investasi yang ikut menentukan pembangunan bangsa dan negara. Sehubungan dengan hal ini, maka menjadi jelas bahwa kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional secara keseluruhan.

Kesehatan merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat. Kesehatan identik dengan mahal dan ada paradigma yang berkembang bahwa kesehatan hanya dapat dinikmati oleh orang kaya saja. Sehingga ada hubungan korelasi antara kesehatan dan kesejahteraan, dimana kesehatan akan meningkatkan kualitas manusia

sehingga bisa menjadi sejahtera dan sebaliknya kesejahteraan akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Berkaitan dengan pembangunan di bidang kesehatan, pemerintah Kota Mataram sudah berupaya menggulirkan beberapa program dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan dapat dipandang dari aspek fisik dan non fisik yang keduanya saling berkaitan. Kualitas fisik penduduk dapat dilihat dari beberapa indikator kesehatan, yaitu Angka Kematian Bayi, Angka Harapan Hidup, angka kesakitan, dan Rata-rata Lama Sakit.

Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan.

4.1. Ketersediaan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan yang memenuhi standar dan mudah diakses oleh masyarakat menjadi syarat mutlak bagi penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Jumlah fasilitas kesehatan di Kota Mataram tahun 2016 terdiri dari 11 unit Rumah Sakit Umum (RSU Pemerintah dan RSU Swasta), 11 unit Puskesmas dan 18 unit Puskesmas Pembantu. Keberadaan Puskesmas dan Puskesmas pembantu di Kota Mataram menyebar diseluruh kecamatan, setiap kecamatan antara 2-5 unit.

Tabel 4.1 Jumlah Fasilitas Kesehatan Di Kota Mataram, 2016

Kecamatan	Rumah Sakit Umum	Puskesmas	Puskesmas Pembantu
(1)	(2)	(3)	(4)
Ampenan	2	2	3
Sekarbela	1	2	5
Mataram	4	1	1
Selaparang	1	3	5
Cakranegara	2	1	1
Sandubaya	1	2	3
Jumlah	11	11	18

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Mataram

Jumlah tenaga kesehatan di Kota Mataram Tahun 2016 terdiri dari 176 orang Dokter Umum, 22 orang Dokter Gigi, 203 dokter spesialis dan 1.414 orang perawat. Seluruh tenaga kesehatan tersebut tersebar diseluruh Puskesmas, Rumah Sakit Umum baik RSU Pemerintah maupun RSU Swasta.

Jika diperhatikan jumlah dokter per kecamatan terlihat jumlah Dokter Umum di masing-masing kecamatan sangat bervariasi antara 8 sampai 55 orang. Kecamatan yang mempunyai dokter umum paling sedikit adalah kecamatan Sekarbela yaitu sebanyak 8 orang, dan yang paling banyak terdapat di Kecamatan Sanduba yaitu sebanyak 55 orang.

Dari tabel 4.2 juga tercatat bahwa jumlah dokter gigi di Kota Mataram tahun 2016 sebanyak 22 orang yang disebar di seluruh kecamatan dan Rumah Sakit Umum baik Swasta maupun pemerintah. Di setiap kecamatan ditempatkan 2 -5 orang dokter gigi.

Tabel 4.2 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kota Mataram, 2016

Kecamatan	Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Dokter Spesialis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ampenan	19	5	157	34
Sekarbela	8	2	124	14
Mataram	46	3	350	46
Selaparang	9	4	60	32
Cakranegara	39	3	349	12
Sandubaya	55	5	374	65
Jumlah	176	22	1414	203

4.2. Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Masyarakat yang sehat biasanya diidentikkan pada masyarakat yang sejahtera. Negara juga menjamin pelayanan kesehatan masyarakat dengan undang-undang Dasar Tahun 1945 dimana pemerintah menjamin ketersediaan dan pemerataan pelayanan kesehatan, dan juga sesuai Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dimana pemerintah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk memperoleh gambaran mengenai kualitas kesehatan masyarakat digunakan beberapa indikator yang menggambarkan kualitas kesehatan masyarakat dan pola berobat masyarakat.

4.2.1. Keluhan Kesehatan

Apabila Dinas Kesehatan mencatat keluhan kesehatan berdasarkan pencatatan atas kasus yang terjadi di fasilitas kesehatan (puskesmas, rumah sakit), BPS melalui Susenas mencatat keluhan kesehatan di rumah tangga. Dengan demikian, individu yang memiliki keluhan kesehatan namun tidak berobat ke fasilitas kesehatan yang ada akan tetap tercakup. Angka kesakitan (morbiditas) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktifitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, sekolah, mengurus rumah tangga maupun kegiatan lainnya.

Tabel 4.3 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin, 2016

Keterangan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Keluhan Kesehatan	32,82	34,96	33,90
Menderita Sakit	54,22	47,88	50,91

Sumber: BPS Kota Mataram (data diolah)

Keluhan kesehatan merupakan gejala adanya suatu penyakit, dan secara umum keluhan kesehatan tersebut berupa panas, batuk, pilek, asma/sesak napas, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi dan penyakit lainnya. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan di suatu wilayah maka semakin rendah derajat kesehatan masyarakat wilayah tersebut.

Pada tahun 2016 penduduk Kota Mataram yang mengalami keluhan kesehatan mencapai 33,90 persen. Keluhan kesehatan lebih banyak dialami penduduk perempuan dengan persentase sebesar 34,96 persen dibandingkan penduduk laki-laki yang hanya sebesar 32,82 persen.

4.2.2. Rata-rata Lama Sakit

Pada umumnya suatu penyakit baru dapat didiagnosa setelah tiga hari, sebab di awal sakit gejala yang timbul masih merupakan gejala parsial yang bersifat umum bagi banyak penyakit. Misalnya panas/demam, hampir semua penyakit ditandai dengan panas/demam, sehingga tanpa adanya gejala-gejala tambahan panas/demam tersebut belum dapat mengindikasikan penyakit yang diderita. Lama hari sakit menjadi salah satu penanda berat atau tidaknya sakit yang diderita, semakin lama (hari) sakit maka dapat diasumsikan bahwa penyakit yang diderita cukup serius. Di jaman serba modern ini, penyakit juga semakin berkembang, maka dari itu slogan “mencegah lebih baik daripada menyembuhkan” dirasa sangat relevan apabila dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari.

Tabel 4.4 Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir Menurut Jumlah Hari Sakit, Rata-rata Lama Sakit (Hari) dan Jenis Kelamin, 2016

Jumlah Hari Sakit	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
≤ 3	53,04	64,63	58,72
4 - 7	33,77	25,70	29,81
8 - 14	8,52	6,45	7,50
15 - 21	0,48	0,22	0,35
22 - 30	4,21	3,00	3,62
Jumlah	100,00	100,00	100,00
Rata-rata lama sakit (hari)	5,29	4,65	4,98

Sumber: BPS Kota Mataram (data diolah)

Rata-rata lama sakit penduduk Kota Mataram pada tahun 2016 mencapai 4,98 hari, dan paling banyak penduduk menderita sakit selama kurang dari 3 hari. Penduduk perempuan rata-rata lama sakit 4-5 hari sedangkan penduduk laki-laki justru lebih lama yaitu 5,29 hari.

4.3. Penolong Kelahiran

Indikator kesehatan lainnya yang juga perlu untuk dilihat adalah pemanfaatan tenaga atau fasilitas kesehatan untuk menolong persalinan mengingat pertolongan persalinan dengan bantuan tenaga medis sangat penting untuk mencegah kematian ibu. Hal ini dikarenakan tenaga medis menerapkan proses persalinan yang telah memenuhi standar kesehatan. Akan tetapi hambatan yang sering ditemui adalah terbatasnya jumlah layanan dan tenaga kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil menjadi penyebab rendahnya akses terhadap tenaga atau layanan medis. Untuk itu, pemerintah daerah perlu selalu berupaya untuk memperluas akses sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya.

Turunnya angka kematian ibu dan bayi turut ditunjang oleh penolong kelahiran. Penolong kelahiran yang telah dilatih dan memiliki kemampuan

medis yang mumpuni akan dapat bertindak cepat apabila terjadi komplikasi pada saat proses melahirkan. Pemerintah daerah dalam hal ini telah melakukan berbagai upaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan untuk membantu kehamilan dan persalinan.

Tabel 4.5 Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir, 2016

Penolong Proses Kelahiran	2016
(1)	(2)
Dokter Kandungan	34,04
Dokter Umum	1,33
Bidan	63,05
Perawat	0,00
Tenaga Kesehatan Lainnya	0,00
Dukun Beranak/ Paraji	1,57
Lainnya	0,00
Tidak Ada	0,00
Jumlah	100,00

Sumber: BPS Kota Mataram (data diolah)

Pada tahun 2016, sebagian besar penolong persalinan adalah bidan dengan persentase lebih dari lima puluh persen yaitu sebesar 63,05 persen. Ada 34,04 persen penolong kesehatan adalah dokter kandungan dan 1,33 persen dokter umum. Sedangkan penolong kelahiran yang dilakukan oleh non medis hanya sebesar 1,57persen yaitu dilakukan oleh dukun beranak. Hal ini mengindikasikan efektifitas program pemerintah yang menyediakan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di Kota Mataram.

4.4. Angka Harapan Hidup (AHH)

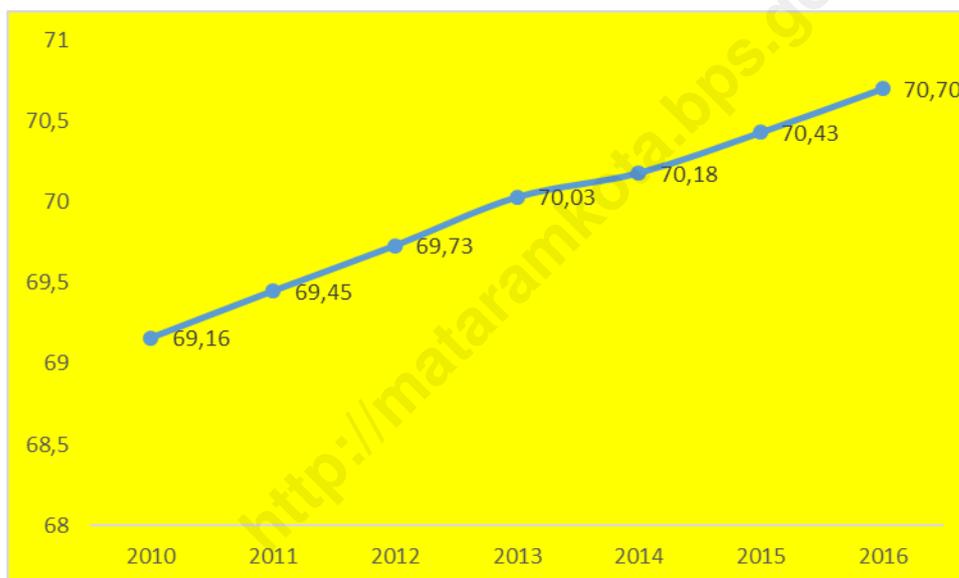
Salah satu indikasi keberhasilan pembangunan kesehatan adalah apabila Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kota Mataram dapat meningkat. Apabila masyarakat Kota Mataram telah dapat hidup dengan sehat maka korelasinya adalah umur yang panjang sehingga AHH meningkat. Sebagai indikator dampak, AHH dapat memberikan gambaran tentang

keberhasilan keseluruhan kegiatan pembangunan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Angka harapan hidup adalah rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. ANgka Harapan HIdup merupakan alat untuk melihat keberhasilan Pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan penduduknya.

Angka harapan hidup yang rendah pada suatu wilayah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya seperti program kesehatan lingkungan, perbaikan gizi dan pengentasan kemiskinan.

Gambar 4.1 Angka Harapan Hidup Kota Mataram 2010-2016 (Tahun)



Sumber: BPS Kota Mataram (data diolah)

Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Mataram selama kurun waktu 2010-2016 menunjukkan peningkatan. Tahun 2010 AHH Kota Mataram 69,16 tahun , meningkat menjadi 69,45 tahun pada tahun 211 dan pada tahun 2016 Angka Harapan Hidup Kota Mataram mencapai 70,70 tahun.

Peningkatan Angka Harapan Hidup menggambarkan peningkatan kualitas kesehatan penduduk, dan hal ini tentu saja sebagai bentuk keberhasilan Pemerintah Kota Mataram dalam pembangunan bidang kesehatan yang terlihat dari ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan.



PENDIDIKAN

Pendidikan adalah jendela masa depan. Untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, pemerintah harus memberikan perhatian penuh dalam bidang pendidikan. Hak asasi setiap warga Negara Indonesia yang dilindungi oleh Undang-Undang adalah pendidikan. Pendidikan tidak memandang status sosial, kondisi ekonomi, suku, etnis, asal seseorang, gender, semua berhak memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Pendidikan akan meningkatkan intelektualitas, kecakapan dan kapabilitas seseorang sehingga mendorong terwujudnya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat yang madani dan modern dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan menjadi sangat penting karena merupakan salah satu investasi pembangunan di masa depan.

Pentingnya pendidikan menjadikan pendidikan sebagai sasaran utama dalam setiap program pembangunan. Berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia melalui pendidikan dilakukan oleh pemerintah mulai dari menyediakan sarana sekolah yang memenuhi standar pendidikan di setiap wilayah Kota Mataram, hingga menambah tenaga pengajar. Pemerintah juga mengupayakan pendidikan dasar gratis bagi setiap warga masyarakat, juga bantuan bagi siswa miskin untuk bersekolah. Efektif atau tidaknya program pendidikan yang dijalankan akan nampak melalui indikator pendidikan.

Beberapa indikator pendidikan yang penting dan lazim digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kebijakan adalah Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (MYS), Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan masih banyak lagi.

5.1. Fasilitas Pendidikan

Ketersediaan fasilitas pendidikan merupakan syarat mutlak pembangunan bidang pendidikan. Sebagai wilayah perkotaan, fasilitas pendidikan untuk semua jenjang pendidikan dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi berada di Kota Mataram. Di Kota Mataram bahkan banyak pula fasilitas pendidikan yang didirikan oleh pihak swasta, namun mutu pendidikannya tetap terjamin sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas masyarakat Kota Mataram.

Selain dari meningkatnya jumlah sekolah, pemerintah juga berusaha meningkatkan kualitas infrastruktur sekolah. Banyak sekolah telah dibangun dan dibuat agar memenuhi standar pendidikan dan keamanan bagi murid-murid yang belajar.

Tabel 5.1 Fasilitas Sekolah di Kota Mataram, 2016

Kecamatan	SD	SMP	SMA	SMK
Ampenan	30	7	2	1
Sekarbela	18	4	1	4
Mataram	36	9	6	5
Selaparang	26	9	7	7
Cakranegara	37	3	2	2
Sandubaya	17	5	3	3
Kota Mataram	164	37	21	22

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Mataram

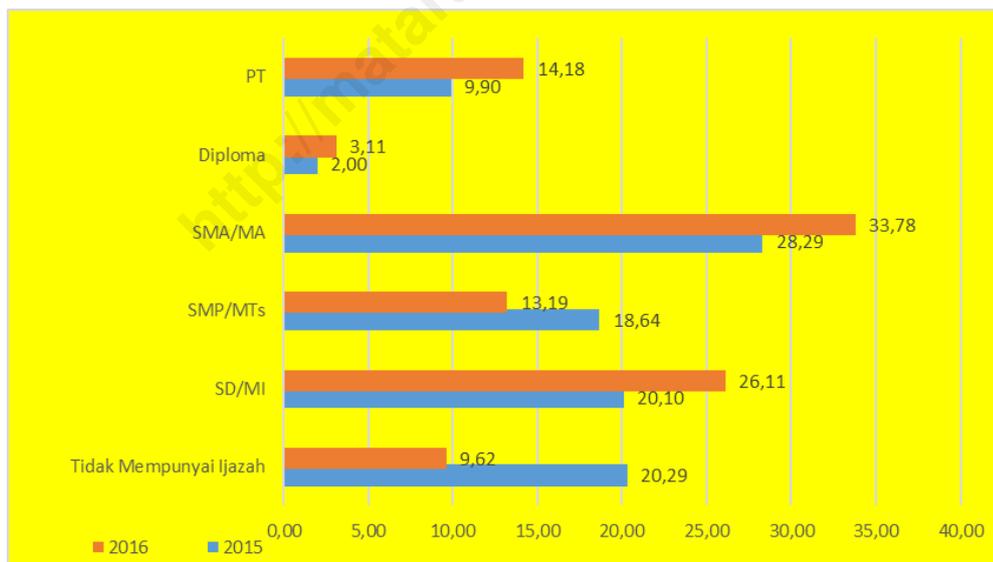
5.2. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka kemampuan intelektual dan kompetensi yang dimilikinya semestinya juga lebih baik. Oleh sebab itu, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan menjadi salah satu

indikator kualitas manusia. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang dibarengi dengan pembangunan di bidang pendidikan, diharapkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan juga semakin meningkat.

Untuk melihat gambaran mengenai kualitas sumber daya manusia suatu wilayah dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas terkait perkembangan kualitas sumber daya manusia suatu daerah dengan melihat jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh mayoritas penduduknya. Dengan mengetahui tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk dapat menjadi salah satu indikator dari tingkat kemampuan SDM di suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan maka menggambarkan semakin baik pula kualitas pendidikannya, hal ini ditandai dengan semakin tingginya persentase penduduk dengan pendidikan SMA keatas.

Gambar 5.1 Persentase Penduduk Usia 15+ Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2015-2016



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Mataram

Selama periode 2015-2016 persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah mengalami penurunan, dari 20,29 pada tahun 2015 menjadi 9,62 persen pada tahun 2016. Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang lulus SMP/MTs juga mengalami penurunan dari 18,64 persen pada tahun 2015 menjadi 13,19 pada tahun 2016. Sedangkan

persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang lulus SMA/MA, Diploma dan Perguruan Tinggi justru mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat Kota Mataram mulai bergeser dari pendidikan dasar 9 tahun (level SMP) ke tingkat yang lebih tinggi yaitu SMA bahkan perguruan tinggi.

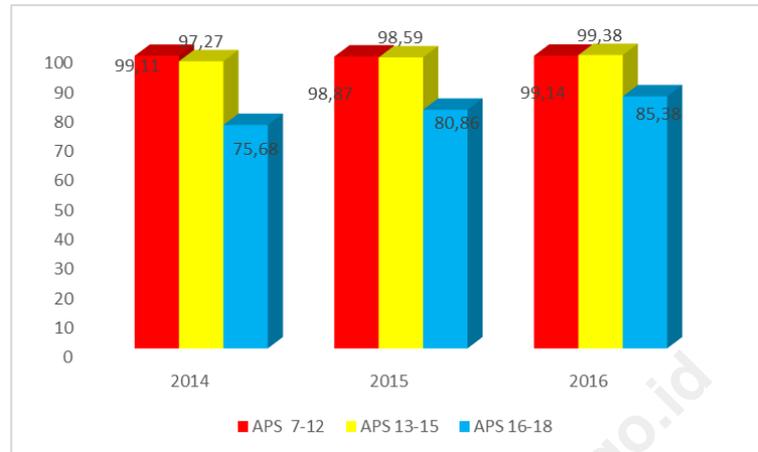
5.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang telah memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang biasa disebut dengan Angka partisipasi sekolah (APS). Angka partisipasi sekolah (APS) dapat menunjukkan perbandingan penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu terhadap total penduduk pada umur tersebut. APS dapat menjadi salah satu indikator yang menggambarkan kesempatan penduduk untuk memperoleh pendidikan. Peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan dibidang pendidikan khususnya upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Untuk perhitungan APS, Umur penduduk dibagi ke dalam tiga kelompok tingkat pendidikan SD, SLTP, dan SLTA. Kelompok pertama 7-12 tahun untuk tingkat pendidikan SD, kelompok umur 13-15 tahun untuk tingkat pendidikan SLTP, dan kelompok umur 16-18 tahun untuk tingkat pendidikan SLTA.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator yang sudah dikenal luas di masyarakat dan kalangan peneliti . APS merupakan perbandingan antara penduduk yang masih bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu dengan penduduk di usia sekolah tersebut. Dengan demikian, APS memberikan gambaran akan kesempatan penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Untuk penghitungan APS, penduduk dikelompokkan dalam kelompok usia sekolah yaitu, SD usia 7 – 12 tahun, SMP usia 13 – 15 tahun dan SMA usia 16 – 18 tahun. Secara umum APS usia SD merupakan yang tertinggi karena mencapai lebih dari 90 persen, dan semakin tinggi tingkat pendidikannya APS nya menjadi semakin rendah.

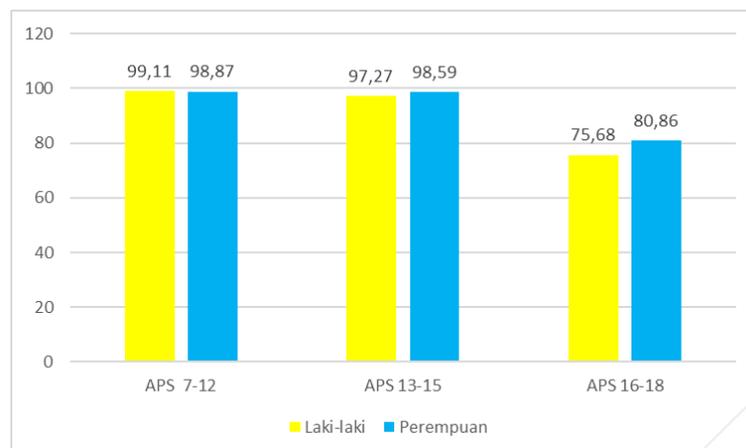
Gambar 5.2 Angka Partisipasi Sekolah di Kota Mataram, 2014-2016



Sumber: BPS Kota Mataram (data diolah)

Gambar 5.2 menunjukkan bahwa APS pada kelompok umur 7-12 tahun pada kurun waktu 2014-2016 sudah mencapai diatas 98 persen. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua penduduk umur sekolah dasar telah menikmati pendidikan dasar. Demikian pula pada kelompok umur 13-15 tahun, APS berkisar antara 97,27 persen sampai dengan 99,38 persen. Untuk kelompok umur 16 - 18 tahun, APS berkisar antara 76,68 persen sampai dengan 85,38 persen. Namun walaupun APS kelompok 16-18 masih terendah diantara kelompok umur lainnya, APS pada kelompok ini telah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan selama kurun waktu 2014-2016.

Gambar 5.3 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kota Mataram, 2016



Sumber: BPS Kota Mataram (data diolah)

Kesetaraan gender dalam dunia pendidikan di Kota Mataram tampaknya telah tercapai, sebab tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah penduduk laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh pendidikan. Hal ini tergambar dari APS di tiga jenjang pendidikan menurut jenis kelamin, dimana APS laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda. Bahkan pada kelompok umur 16-18 tahun APS Perempuan justru lebih tinggi dibandingkan perempuan, hal ini tentu saja menggambarkan tingginya kesadaran kaum hawa untuk menuntut ilmu.

5.4. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator pendidikan yang digunakan untuk mengetahui partisipasi penduduk yang bersekolah tepat pada waktunya. Angka Partisipasi Murni didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa pada usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai yang dinyatakan dalam persentase. APM dibagi menjadi kelompok APM SD untuk penduduk yang berusia 7-12 tahun, APM SMP untuk penduduk yang berusia 13-15 tahun, APM SMA untuk penduduk yang berusia 16-18 tahun.

Tabel 5.2 Angka Partisipasi Murni Kota Mataram, 2015-2016

Keterangan	2015	2016
(1)	(2)	(3)
APM SD	96,75	99,14
APM SMP	75,81	92,74
APM SMA	59,96	70,79
APM PT	41,95	39,66

Sumber: BPS Kota Mataram (data diolah)

Tahun 2016 APM SD hampir mencapai angka 100 yaitu 99,14 persen, hal ini berarti hampir semua penduduk usia 7-12 bersekolah di jenjang yang sesuai tepat pada waktunya sedangkan sisanya bisa disebabkan ada yang memasuki jenjang SD di usia kurang dari 7 tahun atau masih duduk dibangku SD dengan usia lebih dari 12 tahun, atau ada juga penduduk yang sudah

tamat SD di usia kurang dari 12 tahun disebabkan mengikuti program akselerasi pendidikan SD. APM SMP lebih kecil dari nilai APM SD yaitu mencapai nilai 92,74 persen. Tingginya angka APM SD dan SMP menunjukkan keberhasilan program wajib belajar 9 tahun.

APM SMA mencapai 70,79 persen artinya sekitar 70,79 persen penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah sesuai jenjangnya yaitu berumur 16-18 tahun duduk dibangku SMA. Sedangkan sisanya bisa jadi termasuk penduduk yang tinggal kelas dan masih duduk di SMP atau memang ada yang putus sekolah tak bisa melanjutkan ke jenjang SMA, misalnya karena tidak punya biaya. Masih rendahnya APM SMA tentunya makin menguatkan dorongan untuk perlu diselenggarakannya program pendidikan dua belas tahun di Kota Mataram.

5.5. Melek Huruf

Organisasi PBB untuk pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan (UNESCO) mendefinisikan bahwa melek huruf adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menterjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat dalam bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi. Melek huruf, kebalikan dari buta huruf merupakan refleksi dari kemampuan baca dan tulis seseorang. Hanya mengenali huruf, bahkan bisa membaca belum dapat didefinisikan sebagai melek huruf. Seseorang akan dinyatakan sebagai melek huruf apabila dia bisa membaca dan menulis. Huruf pun tak hanya terbatas pada huruf latin, melainkan juga huruf lainnya yang berlaku di masyarakat seperti huruf arab, huruf cina, huruf sansekerta, huruf jawa, dan lain sebagainya. Jadi apabila seseorang tidak bisa membaca dan menulis huruf latin namun ia dapat membaca dan menulis huruf arab maka ia sudah didefinisikan sebagai melek huruf.

Gambar 5.4 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Baca Tulis di Kota Mataram, 2015-2016



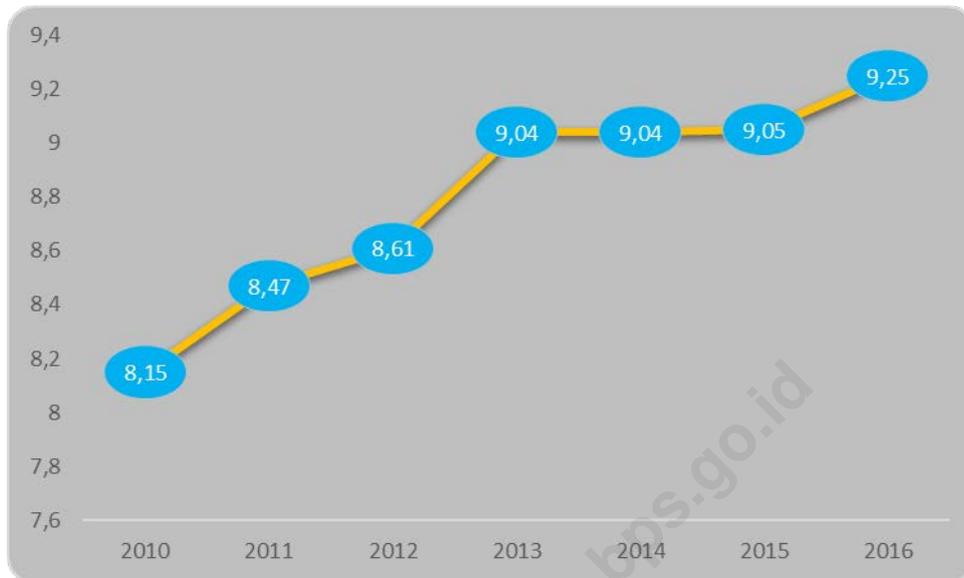
Sumber: BPS Kota Mataram (data diolah)

Angka Melek Huruf Kota Mataram Tahun 2016 sebesar 92,74 persen atas. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin seperti yang disajikan pada Gambar 5.4 terlihat bahwa penduduk perempuan yang buta huruf lebih banyak dari penduduk laki-laki. Pada tahun 2016, AMH penduduk laki-laki sebesar 95,93 persen, sedangkan AMH untuk penduduk perempuan sebesar 89,65 persen.

5.6. Rata-rata Lama Sekolah (MYS/RLS)

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan. Cakupannya adalah penduduk usia 25 tahun ke atas, dengan asumsi pada umur 25 tahun ke atas proses pendidikan sudah berakhir. Perhitungan MYS/RLS menggunakan acuan umur 25 tahun ke atas mengikuti standar Internasional yang digunakan oleh UNDP.

Gambar 5.5 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Baca Tulis di Kota Mataram, 2015-2016



Sumber: BPS Kota Mataram (data diolah)

Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Mataram tahun 2016 mencapai 9,25 tahun, artinya pendidikan penduduk berumur 25 tahun ke atas di Kota Mataram sampai duduk di Kelas 1 SMA. Dibandingkan tahun 2010, rata-rata lama sekolah di Kota Mataram meningkat satu tahun dimana pada tahun 2010 RLS hanya 8,15 tahun.

<http://mataramkota.bps.go.id>



KETENAGAKERJAAN

Masalah ketenagakerjaan tidak lepas dari beberapa isu utama seperti tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya tingkat pendidikan pekerja. Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan ketidakmampuan lapangan pekerjaan yang ada dalam mengatasi jumlah tenaga kerja yang terus bertambah. Artinya ketika daya serap lapangan pekerjaan rendah, maka dapat menimbulkan masalah pengangguran yang tinggi. Kemudian tingkat pendidikan pekerja yang rendah juga mencerminkan rendahnya kualitas pekerja yang dapat berpengaruh terhadap produktivitas kerja mereka. Isu yang saat ini sedang menghangat pula adalah makin tingginya pengangguran terdidik atau pengangguran dengan lulusan pendidikan menengah keatas, hal ini mengindikasikan belum adanya lapangan pekerjaan yang mampu menyerap pengangguran terdidik ini.

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang berasal dari rumah tangga, dan sebagai imbal baliknya balas jasa bagi tenaga kerja berupa upah/gaji akan dipergunakan untuk kesejahteraan rumah tangga. Sehingga jelas baik dari sisi ekonomi maupun sosial, ketenagakerjaan sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa tingginya penduduk usia peroduktif membuat pemerintah dihadapkan pada masalah ketenagakerjaan. Pertumbuhan

lapangan pekerjaan seyogyanya sebanding dengan pertumbuhan penduduk, karena jika tidak yang akan terjadi adalah masalah pengangguran dan imbasnya adalah menurunnya kesejahteraan masyarakat.

Daya saing penduduk dalam lapangan pekerjaan akan berkaitan dengan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia. Dengan kualitas SDM yang memadai maka kesempatannya untuk memperoleh pekerjaan juga akan semakin tinggi. Gambaran akan dunia ketenagakerjaan di Kota Mataram akan tercermin dari beberapa indikator seperti jumlah angkatan kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan lain sebagainya.

6.1. Angkatan Kerja

Yang termasuk dalam kategori angkatan kerja (*labour force*) adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran juga termasuk dalam kategori angkatan kerja.

Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja.

Bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010, penduduk usia kerja Kota Mataram mulai berkurang pada tahun 2011 namun perlahan – lahan kembali bertambah pada tahun 2012 hingga 2013.

Tabel 6.1 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Kota Mataram Tahun 2010-2015 (Jiwa)

Tahun	Penduduk Usia Kerja	Angkatan kerja
(1)	(2)	(3)
2010	292.731	191.862
2011	294.390	190.490
2012	292.486	181.269
2013	309.614	173.846
2014	324.885	198.838
2015	332.430	210.461

Sumber: BPS Kota Mataram (data diolah)

Angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja maka berkurangnya penduduk usia kerja pada tahun 2010 ke 2012 berpengaruh pada jumlah angkatan kerjanya. Pada tahun 2011 angkatan kerja menjadi berkurang demikian pula tahun 2012. Fenomena menarik akan terlihat di tahun 2012 dan 2013 dimana angkatan kerja pada tahun 2012 lebih kecil dari 2013 namun jumlah penduduk usia kerja tahun 2013 justru lebih kecil dibanding tahun 2012. Disinyalir kondisi ini terjadi akibat pergeseran penduduk usia kerja yang masuk dalam kategori bukan angkatan kerja.

6.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Kesempatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan proporsi jumlah penduduk Angkatan Kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja yaitu usia 15 tahun ke atas. Indikator ini menggambarkan sejauh mana peran serta penduduk dalam kegiatan perekonomian wilayah.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah proporsi penduduk yang bekerja terhadap jumlah Angkatan Kerja. TKK akan memberikan gambaran bagaimana besarnya penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja di suatu wilayah sehingga mencerminkan besarnya angkatan kerja terserap dalam lapangan pekerjaan yang tersedia.

Secara umum, apabila tingginya TPAK disebabkan oleh tingginya penduduk yang bekerja, maka TPAK tersebut menunjukkan kinerja partisipasi angkatan kerja yang baik. Namun bila tingginya diiringi dengan rendahnya tingkat kesempatan kerja (persentase penduduk yang bekerja), hal ini cukup mengkhawatirkan, karena berarti penduduk yang mencari pekerjaan meningkat yang selanjutnya dapat memicu tingginya angka pengangguran. Apabila TPAK berada di atas 60 persen artinya dapat dikatakan bahwa partisipasi tenaga kerja dalam pasar kerja masih tergolong cukup aktif dalam menggerakkan perekonomian. Jika pasar kerja bisa menyerap semua angkatan kerja dalam lapangan kerja, peningkatan TPAK akan memberikan nilai positif bagi perekonomian dan pembangunan wilayah.

Tabel 6.2 TPAK dan TKK Kota Mataram Tahun 2010-2015 (Persen)

Tahun	TPAK	TKK
(1)	(2)	(3)
2010	65,54	91,04
2011	64,71	93,30
2012	61,98	93,47
2013	56,15	94,52
2014	61,20	95,21
2015	63,31	92,50

Sumber: BPS Kota Mataram (data diolah)

TPAK Kota Mataram pada tahun 2015 mencapai 63,31 persen artinya dari total jumlah penduduk yang termasuk usia kerja atau tenaga kerja, sebesar 63,31 persen masuk sebagai angkatan kerja yang terlibat aktif dalam kegiatan perekonomian. Jadi hanya sekitar sepertiga dari penduduk usia kerja yang bukan angkatan kerja.

TPAK pada tahun 2010-2013 menunjukkan kecenderungan menurun, namun TKK pada periode tersebut justru mengalami kenaikan. Ini merupakan indikasi baik karena meningkatnya TKK merupakan pertanda bahwa tingkat pengangguran berkurang. Karena besarnya daya serap angkatan kerja yang masuk dalam lapangan kerja berbanding terbalik dengan besarnya pengangguran terbuka. Semakin tinggi daya serap angkatan kerja maka proporsi pengangguran terbuka semakin kecil nilainya, begitu juga sebaliknya.

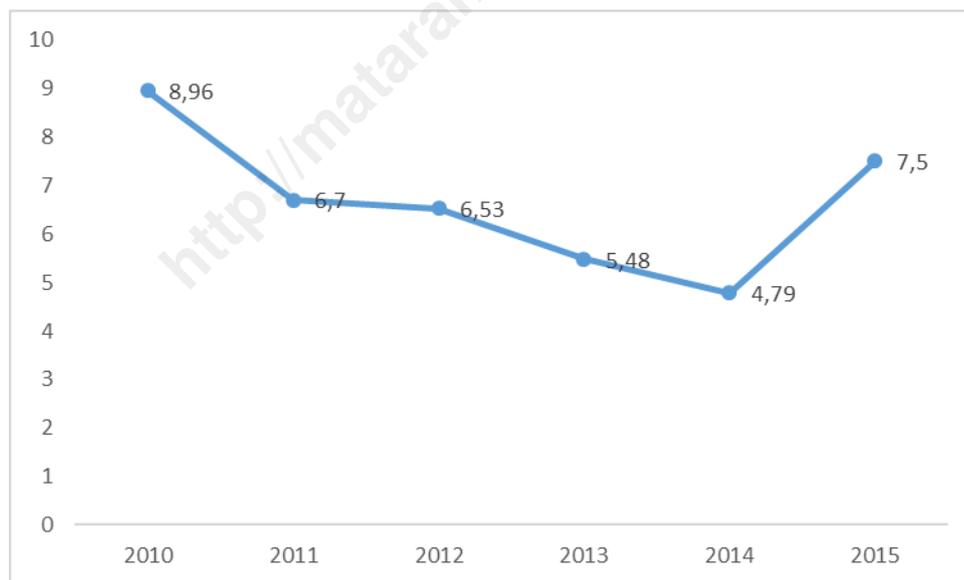
6.3. Tingkat Pengangguran

Dari sisi ekonomi pengangguran merupakan produk ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Pengangguran akan terjadi apabila jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dibandingkan jumlah pencari kerjanya, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan informasi pasar kerja bagi pencari kerja kurang lengkap. Selain itu, pengangguran juga dapat disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi karena perusahaan

menutup/mengurangi bidang usahanya sebagai akibat dari krisis ekonomi, keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi, dan lain-lain.

Tidak seimbangnya *demand* dan *supply* tenaga kerja menyebabkan angka pengangguran bergerak fluktuatif. Bila jumlah *demand* (permintaan) tenaga kerja lebih besar dari jumlah tenaga kerja yang tersedia di pasar tenaga kerja, maka yang terjadi adalah tenaga kerja akan memiliki pilihan yang lebih banyak untuk menentukan kemana akan bekerja. Namun pada kenyataannya, disetiap negara mempunyai kecenderungan bahwa jumlah *demand* tenaga kerja lebih kecil dari pada ketersediaan tenaga kerja (*supply*) yang ada di pasar tenaga kerja, dengan kata lain jumlah lapangan pekerjaan yang diperebutkan para pencari kerja kurang sebanding dengan jumlah pencari kerja.

Gambar 6.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Mataram Tahun 2010-2015 (Persen)



Sumber: BPS Kota Mataram (data diolah)

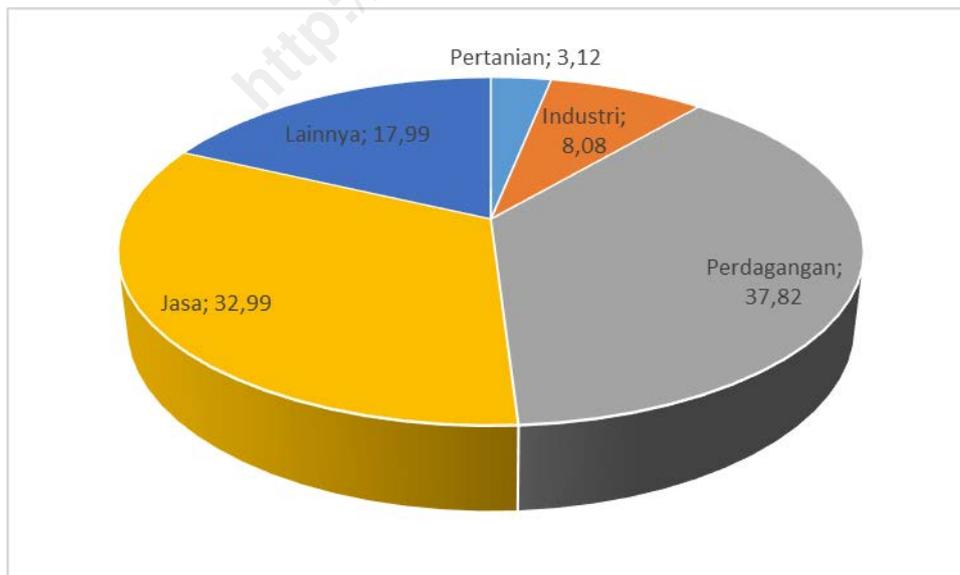
TPT Kota Mataram selama kurun waktu 2010-2014 menunjukkan kecenderungan menurun, namun justru meningkat pada tahun 2015. TPT tertinggi terjadi pada tahun 2010 yang mencapai 8,96 persen dan TPT terendah berhasil dicapai pada tahun 2014 menjadi 4,79 persen. Nilai TPT inilah yang sering kali disebut-sebut berkaitan dengan tolok ukur

keberhasilan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran. Semakin rendah angka TPT maka jumlah penganggur dalam angkatan kerja semakin sedikit, yang berarti daya serap lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja semakin baik. Daerah yang memiliki TPT di bawah 6-7 persen dikatakan daerah yang penganggurannya normal dan bisa disebut daerah *full employment*, Kota Mataram selalu berada pada posisi *full employment* sejak tahun 2011 hingga 2014.

6.4. Lapangan Pekerjaan

Potensi dari sektor-sektor yang ada dalam perekonomian dapat tercermin dari besarnya penduduk yang bekerja dalam sektor-sektor tersebut. Lapangan pekerjaan yang menyerap penduduk bekerja memiliki berbagai variasi. Seperti wilayah perkotaan pada umumnya, penduduk Kota Mataram paling banyak bekerja pada sektor perdagangan dan jasa. Sedangkan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian sangat sedikit yakni hanya 3,12 persen.

Gambar 6.2 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kota Mataram, 2015



Sumber: BPS Kota Mataram



KEMISKINAN dan POLA KONSUMSI

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain hak akan terpenuhinya kebutuhan pangan, terpenuhinya kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, adanya rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Kemiskinan dapat muncul karena banyak faktor dan juga menyangkut banyak aspek seperti sosial, ekonomi bahkan budaya sehingga permasalahan kemiskinan menjadi suatu permasalahan yang multidimensional dimana cukup sulit untuk mengukurnya dan diperlukan adanya suatu kesamaan pandang dalam pengukurannya.

Menurut Revallioon (1998), mengukur kemiskinan dipercaya dapat menjadi instrument yang tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang selalu menjadi perhatian banyak pihak, termasuk pemerintah. Pembangunan senantiasa dilakukan oleh pemerintah, namun selalu saja masalah kemiskinan ini muncul ke permukaan. Berbagai upaya dan kebijakan baik dari tingkat pusat hingga kabupaten telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan.

Dengan sendirinya kemiskinan mutlak menjadi tolak ukur kesejahteraan. Berkurangnya penduduk miskin melambangkan meningkatnya kesejahteraan dan sebaliknya bertambahnya penduduk miskin menjadi *warning* bagi menurunnya kesejahteraan. Hal ini dapat dipahami karena secara konseptual penduduk miskin merupakan penduduk dengan pendapatan rendah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak.

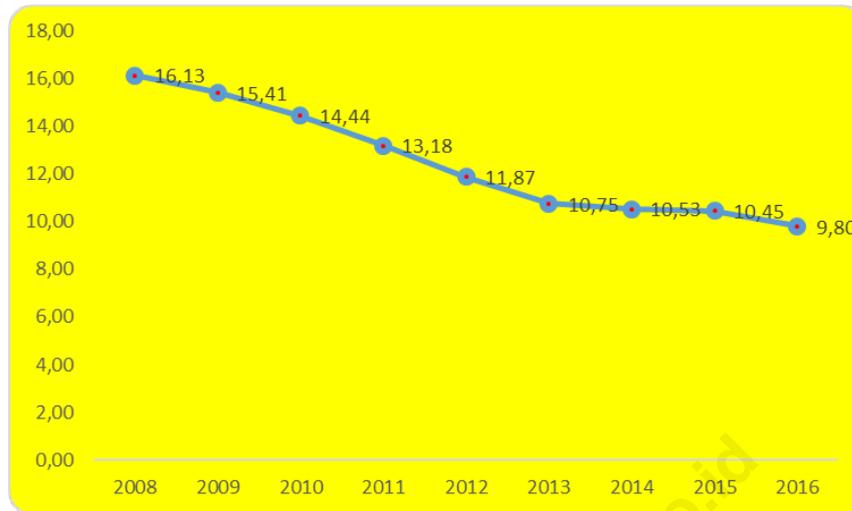
7.1. Perkembangan Penduduk Miskin

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Headcount Index*, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.

Keuntungan yang didapat dari indikator ini adalah bahwa ukuran ini mudah dihitung dan dipahami. Meskipun demikian ada juga kelemahan dari *headcount index* yaitu:

- a. Tidak memperhitungkan intensitas kemiskinan diantara penduduk miskin
- b. Tidak mengindikasikan parahnya kemiskinan yang dialami penduduk miskin
- c. *Headcount Index* hanya memberikan informasi *agregat* sehingga masih diperlukan informasi pendukung lainnya.

Gambar 7.1 Persentase Penduduk Miskin di Kota Mataram Tahun 2008-2016



Sumber: BPS Kota Mataram

Analisis tren kemiskinan selama kurun waktu 2008-2016 dimaksudkan untuk mengetahui tingkat perubahan kemiskinan. Selama kurun waktu tersebut kemiskinan di Kota Mataram menunjukkan penurunan yang ditunjukkan oleh persentase penduduk miskin. Persentase penduduk miskin pada tahun 2008 sebesar 16,13 persen dan secara kontinu terus mengalami penurunan setiap tahunnya sampai pada tahun 2016 persentase penduduk miskin di Kota Mataram di bawah 10 persen yaitu sebesar 9,8 persen. Penurunan tingkat kemiskinan ini merupakan peran serta semua pihak termasuk Pemerintah Kota Mataram melalui berbagai program pengentasan kemiskinan.

Tabel 7.1 Garis Kemiskinan, Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Mataram, 2013-2016

Tahun	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
(1)	(2)	(3)
2013	10,75	46.674
2014	10,53	46.673
2015	10,45	46.760
2016	9,80	44.810

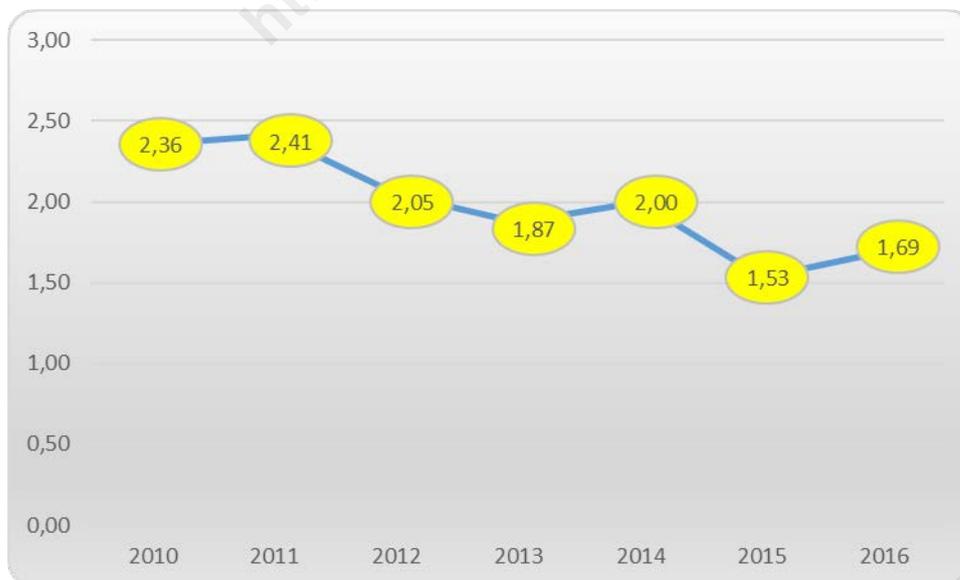
Sumber :BPS Kota Mataram (Susenas)

7.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya jumlah dan persentase penduduk miskin saja, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan, sehingga kebijakan yang dilaksanakan juga mampu mengurangi tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P₁*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Kebijakan kemiskinan sebaiknya tidak hanya ditujukan untuk mengurangi persentase penduduk miskin saja, namun juga dapat mengurangi kedalaman kemiskinan sekaligus keparahannya. Semakin tinggi nilai Indeks kedalaman kemiskinan maka artinya kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) Kota Mataram sejak periode 2010 hingga 2016 memang fluktuatif. Nilai tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 2,36 kemudian P_1 paling rendah tahun 2015 sebesar 1,53. Secara umum dapat dikatakan bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) Kota Mataram selama kurun waktu 2010-2016 mengalami penurunan.

Gambar 7.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Mataram, 2010-2016



Sumber: BPS Kota Mataram

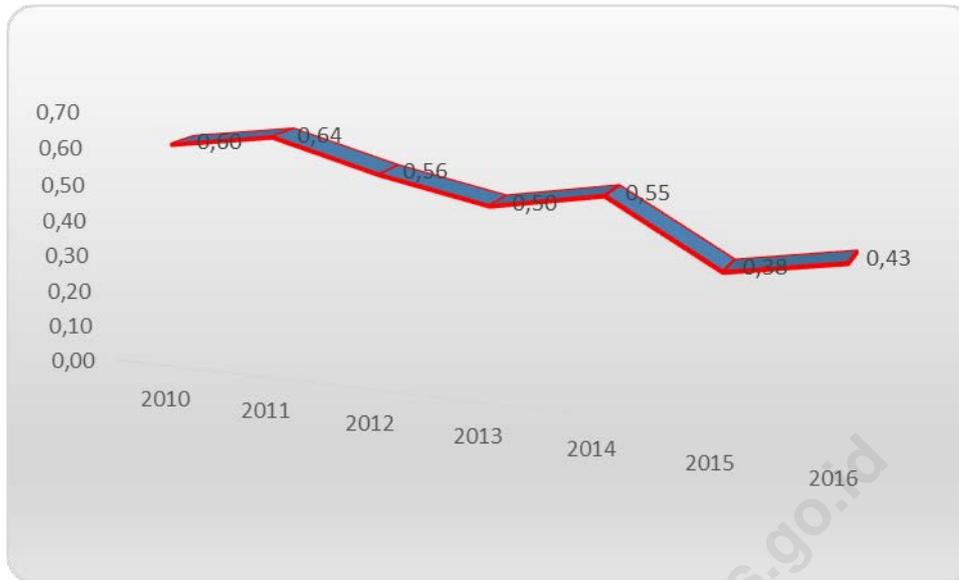
Penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Indeks ini sering dikaitkan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi penduduk miskin diperlukan program perlindungan sosial yang tepat sasaran. Selain itu perlu dirumuskan agar program tersebut dapat mengangkat penduduk miskin keluar dari kemiskinan secara permanen, jadi lebih bersifat padat karya dibanding berbentuk transfer langsung.

7.3. Indeks Keparahan Kemiskinan

Angka Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri, dan dapat digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Semakin tinggi angka indeks keparahan kemiskinan maka sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin itu semakin timpang dan sebaliknya. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin satu dengan lainnya. Untuk itu, persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin saja. Dimensi penyebaran pengeluaran/pendapatan atau ketimpangan dari penduduk miskin perlu dilihat sebagai gambaran parah tidaknya kehidupan penduduk miskin. Karena semakin timpang penduduk miskin maka akan semakin sulit untuk mengentaskan dari kemiskinan. Apabila kesenjangan antara penduduk miskin tidak jauh berbeda maka kebijakan yang sama akan dapat berefek sama bagi penduduk miskin tersebut. Meningkatnya Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan semakin rendahnya kualitas penduduk miskin.

Gambar 7.3 Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Mataram, 2010-2016



Sumber: BPS Kota Mataram

Pola pergerakan indeks keparahan kemiskinan di Kota Mataram cukup fluktuatif namun pergeserannya cenderung tidak terlalu jauh. Indeks keparahan kemiskinan Kota Mataram tahun 2010 hanya sebesar 0,60 dan mengalami peningkatan pada tahun 2011 menjadi 0,64. Dengan menurunnya angka indeks keparahan kemiskinan ini maka sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin sebaran menyempit atau diantara penduduk miskin pengeluarannya berkurang ketimpangannya.

Antara tahun 2012 – 2013, P2 turun sebesar 0,08 dan 0,06 poin yang artinya dengan menurunnya angka indeks keparahan kemiskinan ini maka sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin sebaran menyempit atau diantara penduduk miskin pengeluarannya berkurang ketimpangannya.

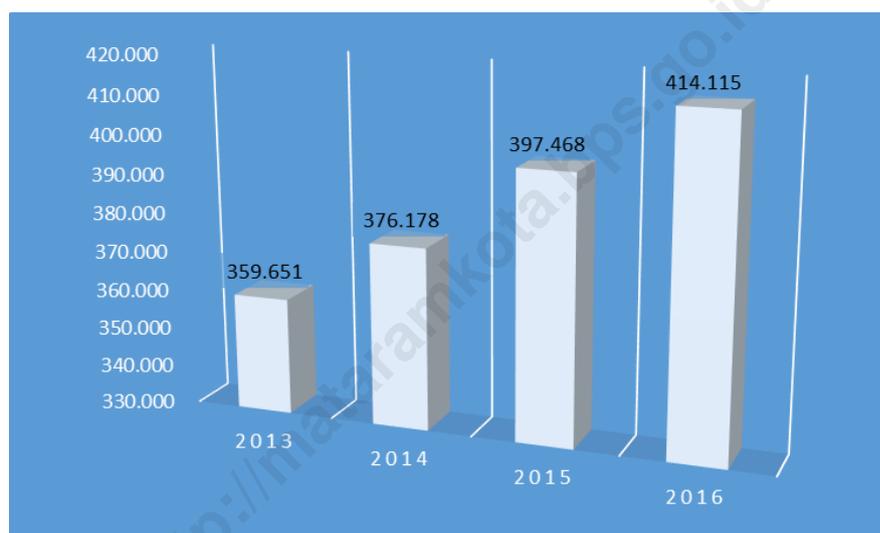
P2 kembali mengalami kenaikan pada tahun 2014 menjadi 0,55 kemudian turun pada 2015 menjadi 0,38 dan kembali meningkat pada tahun 2016 menjadi 0,43, artinya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin melebar.

7.4. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan pembatas antara penduduk yang miskin dan tidak miskin. Apabila pengeluaran perkapita per bulan penduduk lebih

tinggi dari garis kemiskinan maka dia akan menjadi tidak miskin. Sebaliknya apabila lebih kecil dari garis kemiskinan maka ia akan menjadi penduduk miskin. Penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan merupakan kasus batas yang dikategorikan sebagai penduduk yang rentan miskin. Penduduk rentan miskin ini akan mudah naik menjadi tidak miskin namun juga akan mudah jatuh menjadi miskin. Sedikit saja ada gejolak ekonomi maka penduduk rentan miskin akan berkontribusi pada besarnya penduduk miskin.

Gambar 7.4 Garis Kemiskinan di Kota Mataram, 2013-2016



Sumber: BPS Kota Mataram

Garis kemiskinan Kota Mataram pada tahun 2013 adalah Rp 359.651 sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp 376.178. Garis kemiskinan akan terus meningkat, dan hingga tahun 2016 garis kemiskinan Kota Mataram telah mencapai Rp 414.115 perkapita per bulan.

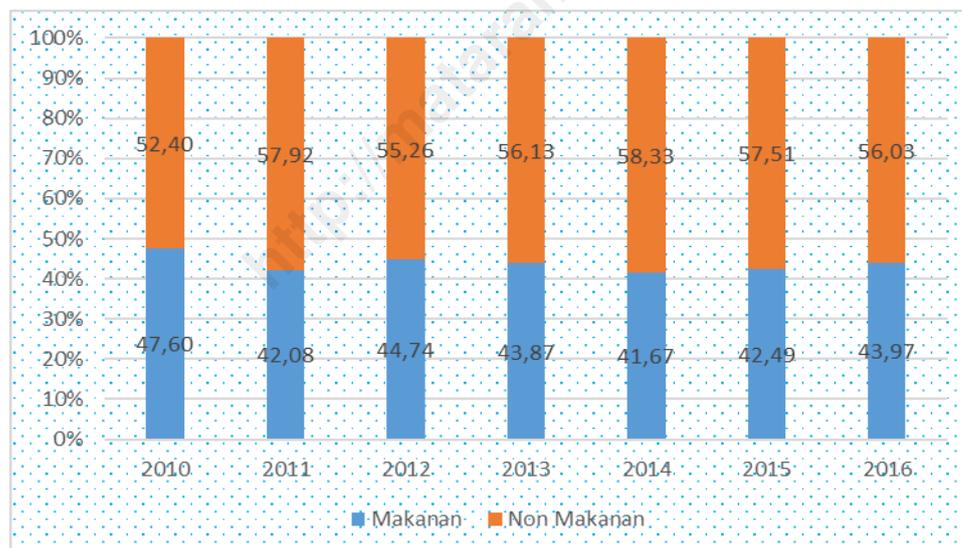
7.5. Pola Konsumsi

Indikator sosial ekonomi lainnya yang perlu ditelaah dalam kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pola pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pola pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia untuk hidup, sehingga sebesar apapun pendapatan seseorang ia akan tetap berusaha untuk mendapatkan makanan

yang memadai.

Pengkajian terhadap beberapa hasil survei sosial ekonomi, mengindikasikan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga akan memprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok (makanan). Seiring dengan meningkatnya pendapatan, persentase pengeluaran untuk makanan akan semakin mengecil dan akan bergeser pada pengeluaran konsumsi bukan makanan. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi yang menyatakan bahwa *bila selera tidak berbeda maka persentase pengeluaran untuk makanan akan menurun dengan meningkatnya pendapatan*. Oleh karena itu komposisi pengeluaran rumahtangga dapat dijadikan ukuran guna menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat perekonomian penduduk.

Gambar 7.5 Persentase Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan di Kota Mataram, 2010-2016



Sumber: BPS Kota Mataram

Berdasarkan Gambar 7.5 tergambar bahwa dari komposisi pengeluaran tersebut ternyata lebih dari separuh pengeluaran penduduk Kota Mataram digunakan untuk memenuhi kebutuhan non makanan, artinya setiap tahun masyarakat Kota Mataram cenderung menuju ke tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya

elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau ditabung.

<http://mataramkota.bps.go.id>

<http://mataramkota.bps.go.id>



PERUMAHAN

Rumah merupakan kebutuhan primer bagi manusia untuk bertahan hidup. Tidak hanya sebagai tempat berlindung dari panas dan hujan, rumah juga menjadi bagian dari gaya hidup. Di jaman modern ini rumah menjadi simbol keamanan yang mencirikan status sosial pemiliknya. Sebagai salah satu kebutuhan dasar, perumahan dan perlengkapannya merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan.

Disadari atau tidak, rumah turut memiliki andil dalam pembinaan watak dalam kepribadian, bahkan kreatifitas seseorang. Di dalam rumahlah pendidikan yang paling dasar ditanamkan oleh keluarga. Maka tidaklah mengherankan apabila rumah yang layak huni dan sehat akan mampu mencetak manusia-manusia yang berkualitas yang akan turut serta dalam proses ekonomi. Kualitas rumah yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan dituangkan dalam Keputusan Menteri Nomor 9 Tahun 1999 didefinisikan sebagai kondisi rumah yang memenuhi standar minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi dan kualitas teknis. Oleh sebab itu kualitas dari rumah amat ditunjang oleh fasilitas yang ada di rumah tersebut.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang dimiliki. Fasilitas penunjang lainnya adalah luas lantai

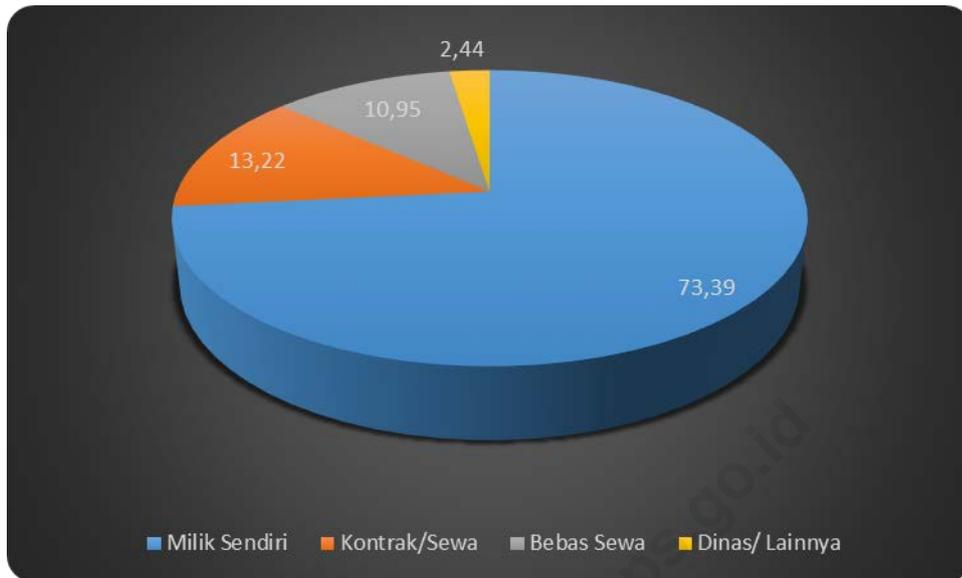
hunian, sumber air minum, fasilitas buang air besar dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan ketersediaan fasilitas perumahan yang memadai memerlukan biaya dan karenanya semakin sejahtera penduduk maka semakin baik pula fasilitas perumahannya. Memiliki sebuah rumah saja sudah menjadi simbol kesejahteraan karenanya status kepemilikan rumah juga menjadi salah satu indikator utama dalam kualitas perumahan.

8.1. Status Penguasaan Tempat Tinggal

Tinggal di rumah kontrakan yang besar tentulah akan berbeda rasanya dibandingkan dengan tinggal di rumah sendiri walaupun sempit. Pengeluaran rumah tangga akan mengerucut apabila rumah yang ditinggalinya telah menjadi rumah milik sendiri. Selain itu kepemilikan rumah juga melambangkan status ekonomi seseorang di lingkungan tempat tinggalnya. Mahalnya harga untuk memiliki rumah sendiri membuat rumah tangga yang mampu membeli rumah dicap sebagai rumah tangga yang sejahtera.

Penguasaan tempat tinggal dengan status kontrak, sewa atau bahkan bebas sewa akan cenderung fluktuatif persentasenya. Hal ini bukanlah tanpa alasan, pada umumnya rumah di kontrak datau disewa dalam tahunan atau bahkan bulanan. Dengan demikian mobilitas dari rumah tangga yang berstatus mengontrak, sewa atau bebas sewa ini sangat tinggi. Apabila pada tahun 2010 dia masih berstatus kontrak, sewa atau bebas sewa maka pada tahun berikutnya atau bahkan bulan berikutnya status penguasaan tempat tinggalnya dapat saja berubah. Fluktuasi ini biasanya lebih tinggi terjadi di daerah perkotaan terutama dikarenakan pendatang yang tidak ingin menetap sehingga memilih untuk kontrak, sewa atau bebas sewa.

Gambar 8.1 Persentase Rumah Tangga menurut Status Penguasaan Rumah di Kota Mataram, 2016



Sumber: BPS Kota Mataram (data diolah)

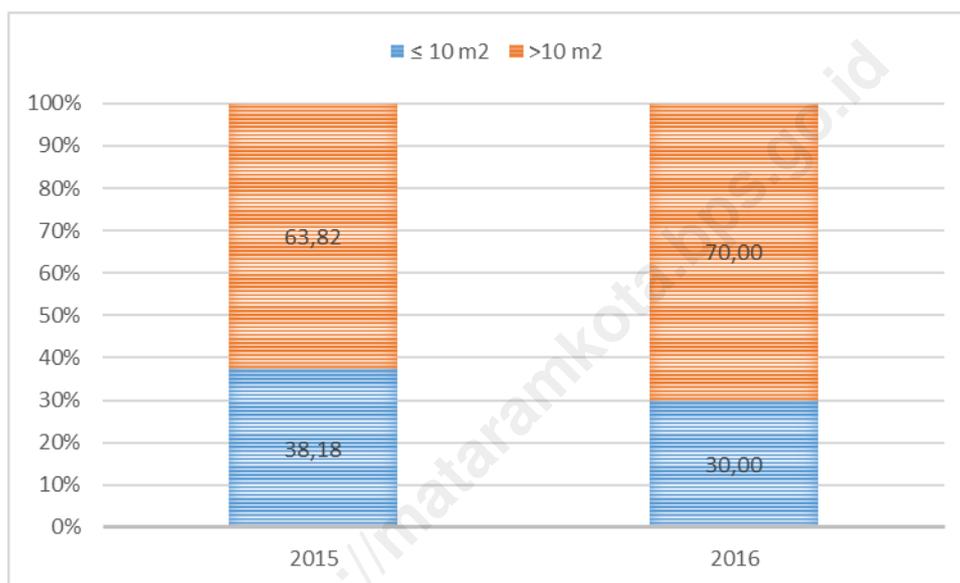
Di Kota Mataram, tempat tinggal penduduk dengan status penguasaan milik sendiri ternyata mencapai lebih dari 73 persen pada tahun 2016. Banyaknya pembangunan perumahan dengan sistem cicilan (seperti KPR/BTN) di perkotaan disinyalir menjadi alasan tingginya kenaikan persentase rumah miik sendiri. Hal ini tentu saja menggembirakan karena artinya mayoritas pendudukKota Mataram telah terpenuhi kebutuhan akan papan/ perumahan.

8.2. Kualitas Tempat Tinggal

Rumah tinggal dengan kualitas yang layak merupakan salah satu penentu kualitas hidup yang dijalani penduduk yang tinggal di dalamnya. Karena itu seseorang yang tinggal di rumah dengan kwaitas yang baik akan memiliki penyokong yang baik pula, karena sejatinya rumah merupakan tempat berlindung dan bernaung dari keadaan alam sekitarnya dan tempat membangun keluarga. Kualitas rumah juga pada umumnya mencerminkan kemampuan ekonomi orang yang tinggal di dalamnya. Keluarga yang maemiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik akan mampu secara finansial untuk membangun rumah dengan kualitas yang baik, dibandingkan orang yang memiliki keadaan ekonomi yang lebih buruk.

Pemenuhan kebutuhan rumah tidak hanya sebatas kepemilikan semata, akan tetapi juga harus memenuhi standar kelayakan rumah. Rumah yang layak akan memberi kenyamanan bagi penghuninya dan mendukung penghuninya memiliki pola hidup sehat. Terkait dengan ukuran luas per kapita, Badan Kesehatan Dunia atau WHO dan kemenpera menggunakan standar minimal luas rumah 10 m² per orang.

Gambar 8.2 Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Hunian Per Kapita di Kota Mataram, 2015-2016



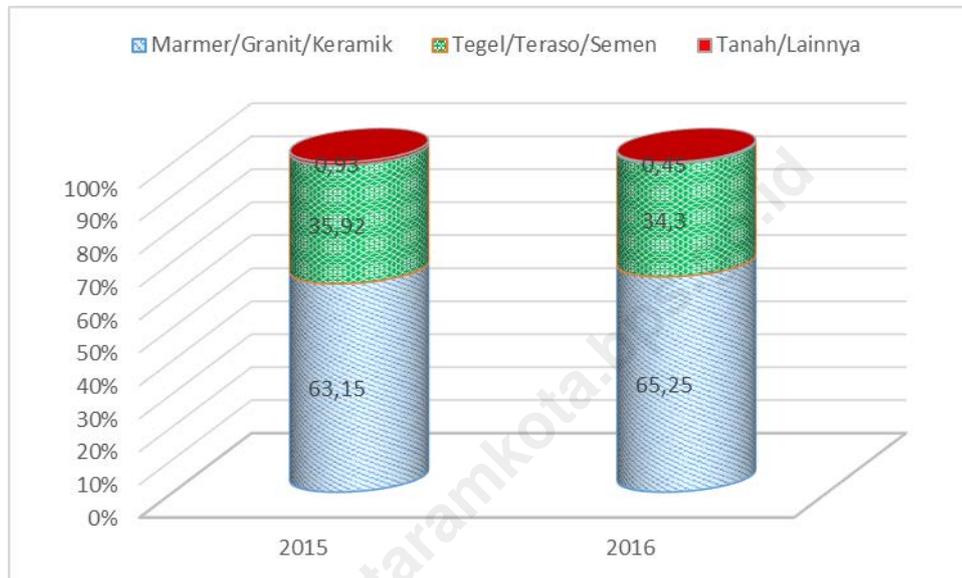
Sumber: BPS Kota Mataram (data diolah)

Berdasarkan data Susenas Kota Mataram tahun 2015, rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan dari sisi luas per kapita masih cukup banyak (lebih dari 35 persen). Persentase ini mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 30 persen. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas rumah di Kota Mataram semakin meningkat kelayakannya dilihat dari sisi luas per kapita.

Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya rumah yang berkualitas adalah rumah yang layak huni dan memenuhi standar kesehatan. Syarat dari layak huni diantaranya mempunyai dinding, atap, lantai dan ventilasi udara. Kualitas dari fasilitas standar perumahan tersebut memang sangat bergantung pada material bahan yang digunakan. Misalkan atap yang terbuat dari genteng akan lebih berkualitas dibandingkan atap yang terbuat dari

ijuk/rumbia sebab atap dari genteng lebih tahan terhadap panas dan hujan, terlebih lagi apabila terjadi kebakaran atap yang terbuat dari genteng akan membutuhkan waktu lebih lama untuk terbakar dibandingkan dengan ijuk/rumbia.

Gambar 8.3 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas di Kota Mataram, 2015-2016

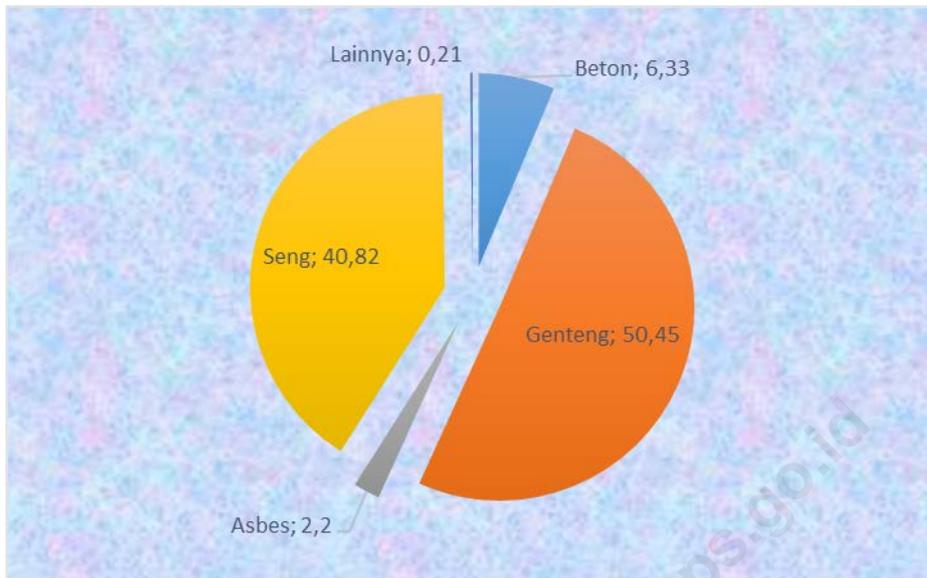


Sumber: BPS Kota Mataram (data diolah)

Secara umum rumahtangga di Kota Mataram menempati rumah dengan jenis lantai terluas terbuat dari marmer/granit/keramik dengan persentase lebih dari 50 persen. Namun disisi lain masih terdapat rumahtangga yang lantai terluasnya terbuat dari tanah/lainnya walaupun dengan persentase yang sangat rendah.

Bagian rumah yang tak kalah pentingnya adalah atap, karena fungsinya untuk melindungi bagian dalam bangunan dari keadaan cuaca. Kualitas atap yang baik juga akan memberikan rasa aman dan nyaman terhadap orang yang tinggal di dalamnya.

Gambar 8.4 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas di Kota Mataram, 2016

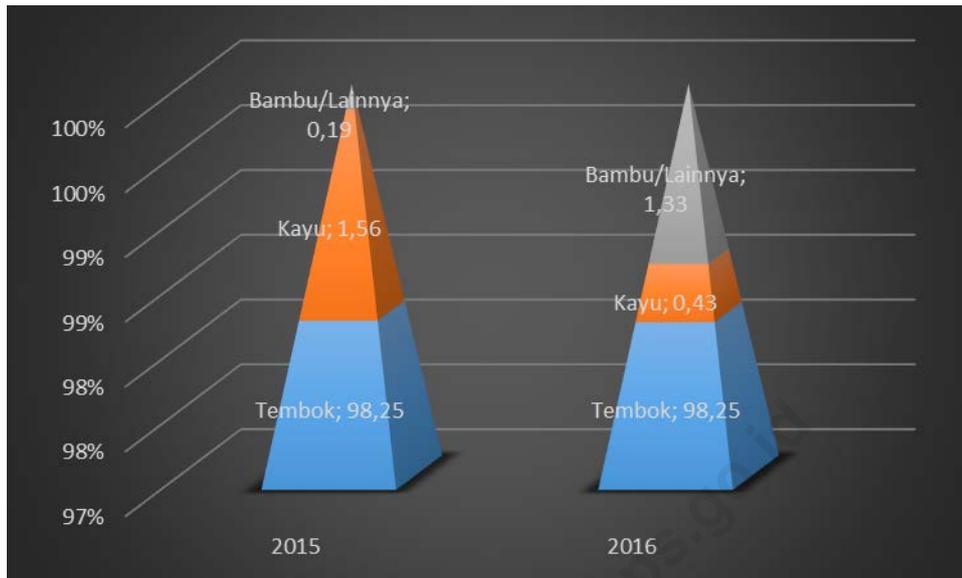


Sumber: BPS Kota Mataram (data diolah)

Lebih dari 50 persen rumahtangga di Kota Mataram menggunakan atap rumah berupa genteng, selain itu atap terbuat dari seng menjadi pilihan kedua rumahtangga di Kota Mataram sebagai atap rumahnya. Walaupun daerah perkotaan, Di Kota Mataram masih terdapat rumah tangga yang menggunakan atap rumahnya berupa Bambu/ Kayu/ Sirap/ Jerami/ Ijuk/ Daun/ Rumbia/ Lainnya walaupun dengan persentase yang sangat kecil yaitu 0,21 persen.

Kualitas lantai dan atap juga perlu didukung oleh kualitas dinding yang baik. Material pembangun dinding juga memiliki andil dalam keamanan dan kesehatan penduduk. Dinding yang terbuat dari tembok merupakan yang direkomendasikan agar rumah menjadi layak huni. Pada tahun 2015-2016 hampir seluruh rumhtangga di Kota Mataram menempati rumah dengan jenis dinding terluas terbuat dari tembok dengan persentase sebesar 98,25 persen.

Gambar 8.5 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Terluas di Kota Mataram, 2016



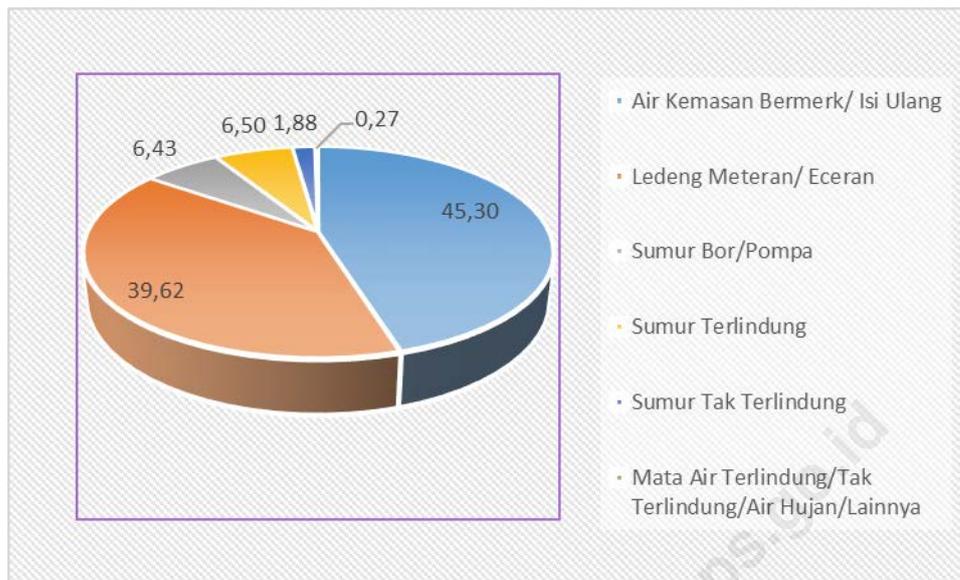
Sumber: BPS Kota Mataram (data diolah)

8.3. Fasilitas Air Minum

Sumber air minum merupakan sarana yang sangat penting bagi kelangsungan hidup. Ketersediaannya dalam jumlah cukup dan juga jaminan akan kelayakannya untuk diminum menjadi suatu keharusan agar rumah tangga dapat bertahan. Ada sumber air namun tidak layak minum akan berpengaruh terhadap derajat kesehatan penduduk.

Masyarakat Kota Mataram hampir separuh dari jumlah rumahtangga yang ada menggunakan air kemasan bermerk/isi ulang sebagai sumber air minum utamanya. Persentase sumber air minum terbesar kedua yang digunakan masyarakat Kota Mataram adalah ledeng meteran/eceran. Selain itu ada sebagian kecil rumahtangga yang menggunakan sumur terlindung dan sumur bor/pompa sebagai sumber air minum utamanya dengan persentase masing-masing sebesar 6,50 persen dan 6,43 persen. Meskipun tinggal di wilayah perkotaan namun masih terdapat rumahtangga yang menggunakan sumur tak terlindung dan Mata Air Terlindung/Tak Terlindung/Air Hujan/Lainnya walaupun jumlah hanya sedikit.

Gambar 8.6 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Utama di Kota Mataram, 2016



Sumber: BPS Kota Mataram (data diolah)

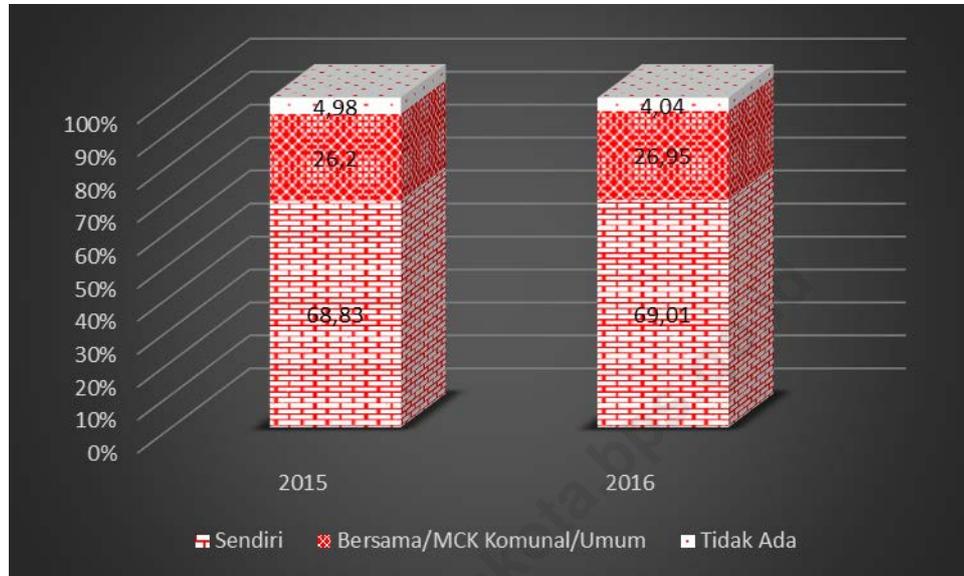
Sumber air minum dibedakan menjadi sumber air minum bersih dan sumber air minum layak. Sumber air minum bersih terdiri dari sumber air minum yang berasal dari air kemasan, air isi ulang, dan (sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke tempat penampungan akhir tinja ≥ 10 m. Sedangkan sumber air minum layak adalah sumber air minum yang berasal dari ledeng, air hujan dan (sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke tempat penampungan akhir tinja ≤ 10 m. Rumahtangga yang menggunakan sumber air bersih di Kota Mataram tahun 2016 sebanyak 91,97 persen, namun rumahtangga yang mengakses sumber air minum layak hanya sebesar 46,67 persen.

8.4. Fasilitas Buang Air Besar

Fasilitas Buang Air Besar (BAB) merupakan salah satu syarat penting bagi sanitasi dalam rumah. Tidak adanya fasilitas Buang Air Besar terutama milik sendiri akan menyebabkan ketidaknyamanan, karena kebutuhan akan fasilitas ini datangnya tak terduga. Untuk bisa memiliki fasilitas BAB sendiri di rumah memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, oleh sebab itu

selain penting bagi kesehatan, fasilitas BAB juga menjadi indikasi kesejahteraan rumah tangga.

Gambar 8.7 Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kota Mataram, 2015-2016

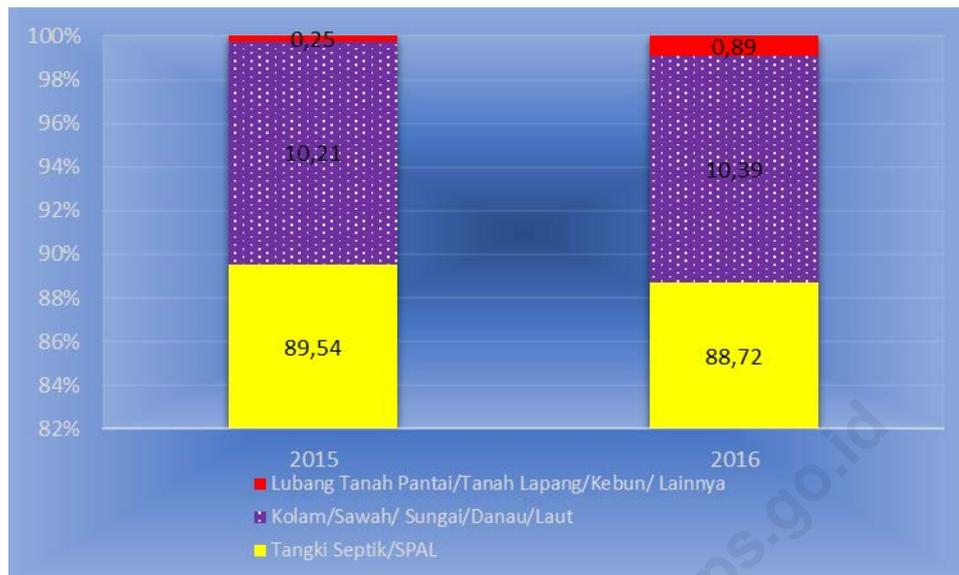


Sumber: BPS Kota Mataram (data diolah)

Kesadaran penduduk akan pentingnya keberadaan fasilitas BAB sepertinya sudah semakin meningkat. Hal ini terbukti dari semakin meningkatnya persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas BAB sendiri. Selama kurun waktu 2015-2016 persentase rumahtangga yang menggunakan fasilitas BAB milik sendiri meningkat dari 68,83 persen menjadi 69,01 persen tahun 2016. Selaras dengan hal itu jumlah rumahtangga yang tidak memiliki fasilitas BAB mengalami penurunan dari 4,98 persen menjadi 4,04 persen. Upaya Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan fasilitas BAB salah satunya dengan pembangunan sarana MCK umum pada beberapa kawasan yang terindikasi belum tersedia fasilitas tersebut.

Ketersediaan fasilitas tempat buang air besar perlu didukung oleh tempat pembuangan yang memadai. Tempat pembuangan akhir yang tidak memadai dapat mencemari lingkungan dan menyebabkan tingginya risiko terkena penyakit yang disebabkan oleh tinja yang dibuang setiap harinya.

Gambar 8.8 Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kota Mataram, 2015-2016



Sumber: BPS Kota Mataram (data diolah)

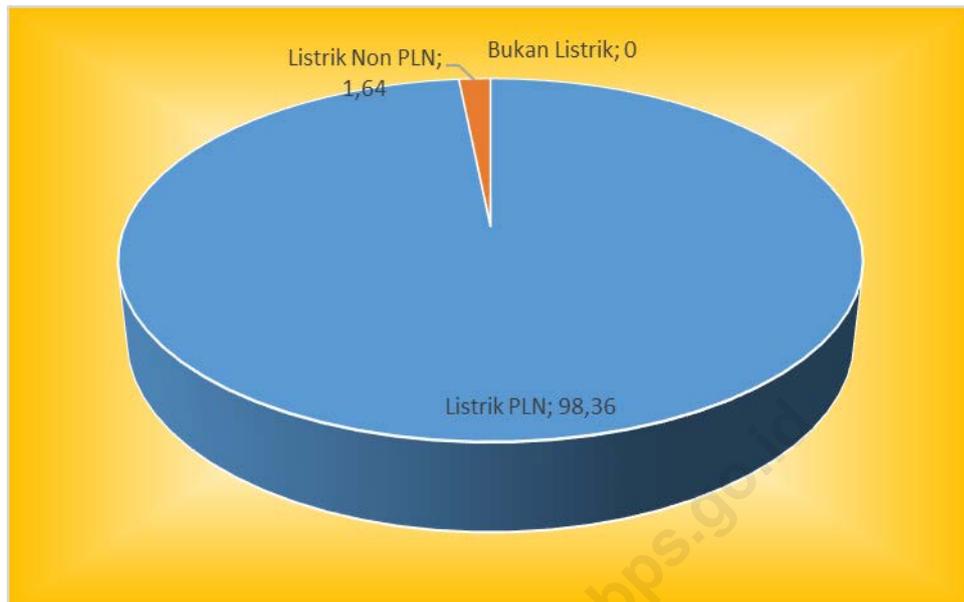
Sebagian besar warga Kota Mataram telah memiliki tangki septik/SPAL. Hal ini tingginya menunjukkan kesadaran penduduk Kota Mataram pentingnya kebersihan dan kesehatan, walaupun masih ada sebagian rumahtangga yang masih menggunakan lubang tanah/pantai/tanah lapang/kebun/lainnya sebagai tempat pembuangan tinja.

8.5. Sumber Penerangan

Salah satu ciri dari kemajuan adalah keberadaan listrik. Listrik sebagai sumber energi telah hadir dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sumber penerangan dari listrik memang yang ideal karena cahaya dari listrik baik itu dari PLN maupun non PLN jauh lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya.

Pada tahun 2016 semua rumahtangga di Kota Mataram telah menikmati listrik. Namun Listrik PLN memang belum bisa dengan maksimal melayani masyarakat Kota Mataram karena keterbatasan energi yang dihasilkan, sehingga masih terdapat rumahtangga yang menggunakan listrik non PLN.

Gambar 8.8 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Utama di Kota Mataram, 2016



Sumber: BPS Kota Mataram (data diolah)

<http://mataramkota.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, 2012. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2012*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- BPS Prov. NTB, 2015. *Indikator Kesejahteraan Provinsi NTB 2015*. Mataram: UD. Teratai
- BPS Kab.Lombok Barat, 2013. *Analisis Angkatan Kerja Lombok Barat 2013*. Gerung: CV. Maharani
- *Analisis Peta Kemiskinan Lombok Barat 2013*. Gerung: CV. Maharani
- Kemenkokesra, 2014. *Analisis IKraR NTB 2009-2013*. Mataram.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MATARAM**

Jl. Jendral Sudirman No. 71 Mataram
Telp/Fax : 0370 642544 Email : bps5271@bps.go.id
Homepage : <http://mataramkota.bps.go.id>